

LAPORAN KINERJA BALAI BESAR POM DI PEKANBARU

2017



JL. DIPONEGORO NO 10. PEKANBARU.
RIAU
TELP 0761-21496 FAX 0761-28755



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
HIGHLIGHT / MILESTONES	viii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum Organisasi.....	1
1.2 Struktur Organisasi.....	2
1.3 Aspek Strategis Organisasi.....	4
1.4 Analisis Lingkungan Strategis.....	5
1.5 Isu Strategis.....	6
II. PERENCANAAN KINERJA	8
2.1 Rencana Strategis.....	8
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2017.....	14
2.3 Kriteria Pencapaian Indikator.....	18
III. AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	19
3.2 Realisasi Anggaran.....	44
3.3 Analisis Efisiensi Kegiatan.....	47
IV. PENUTUP	48
4.1 Kesimpulan.....	48
4.2 Saran Rencana Perbaikan Untuk Tahun 2018.....	49

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja	18
Tabel 2. Capaian Kinerja Balai Besar POM di Pekanbaru	19
Tabel 3. Realisasi Anggaran secara umum	44
Tabel 4. Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Ikhtisar Renstra	50
Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan 2017	51
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Pekanbaru Tahun 2017	55
Lampiran 4. Pengukuran Kinerja	58
Lampiran 5. Pengukuran Kinerja Kegiatan	59
Lampiran 6. Pengukuran Kinerja Program	60
Lampiran 7. Pengukuran Efisiensi Kegiatan	61
Lampiran 8. Sertifikat Tanah	62
Lampiran 9. Hasil Reviu Indikator	64

KATA PENGANTAR



LAPKIN (Laporan Kinerja) dimaksudkan sebagai media pertanggung jawaban keberhasilan dan atau kegagalan Balai Besar POM di Pekanbaru dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang tercantum dalam Rencana Strategis Balai Besar POM di Pekanbaru periode 2015 - 2019. LAPKIN disusun dengan mengikuti petunjuk pedoman penyusunan LAPKIN yang mengacu pada peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Substansi LAPKIN ini menginformasikan capaian kinerja Balai Besar POM di Pekanbaru tahun 2017, yang terkait dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja tahun 2017, sekaligus merupakan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan merupakan mata rantai capaian kinerja dari tahun-tahun sebelumnya.

LAPKIN tahun 2017 diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui atau memperoleh gambaran mengenai Balai Besar POM di Pekanbaru beserta output yang telah dihasilkan selama ini dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

Kami menyadari bahwa laporan ini belumlah sempurna, karenanya kami masih mengharapkan masukan yang positif dan dukungan konstruktif guna mengembangkan kinerja Balai Besar POM di Pekanbaru di masa mendatang sekaligus bagi Badan POM secara keseluruhan dalam mencapai kinerja yang lebih baik pada tahun-tahun selanjutnya dan sesuai dengan komitmen Balai Besar POM di Pekanbaru untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya dari tahun ke tahun. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuannya dalam pembuatan laporan ini.

Pekanbaru, 26 Januari 2018

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru

Mohamad Kashuri, S.Si., Apt., M.Farm

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, tugas Balai Besar POM di Pekanbaru adalah melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapeutik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya. Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru mempunyai Rencana Strategis yang disusun mengacu pada Renstra Badan POM 2015 – 2019. Dalam Renstra tersebut telah ditetapkan tujuan dan sasaran strategis juga kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan strategis.

Tujuan strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	% CAPAIAN TOTAL	KRITERIA
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Persentase obat yang memenuhi syarat	101,98	104,56	Memuaskan
	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	114,15		
	Persentase kosmetik yang memenuhi syarat	109,01		
	Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	104,89		
	Persentase makanan yang memenuhi syarat	92,78		
Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat	102,65	101,33	Memuaskan
	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	100%		
Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP Balai Besar POM di Pekanbaru oleh Badan POM	87,63	87,63	Cukup

Dari tabel diatas terlihat bahwa untuk 3 sasaran strategis yang telah ditetapkan maka Balai Besar POM di Pekanbaru dapat mencapai kriteria memuaskan untuk 2 sasaran strategis yaitu Menguatnya Sistem Pengawasan Obat Dan Makanan dan Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, dan Partisipasi Masyarakat, hal ini disebabkan oleh :

- Secara umum sampling telah dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditentukan Badan POM sehingga dapat memenuhi target Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan.
- Peningkatan kerjasama lintas sektor yang semakin intensif melalui operasi bersama terkait pengawasan Obat dan Makanan.

- c. Peningkatan cakupan kegiatan KIE melalui mobil laboratorium keliling, komunitas pasar yang diberdayakan, GNPOPA, gerakan keamanan pangan desa, dll.
- d. Peningkatan kompetensi petugas melalui pendidikan dan pelatihan baik yang terstruktur maupun tidak.
- e. Penetapan target pengawasan Obat dan Makanan dilakukan sesuai dengan kondisi SDM dan anggaran yang tersedia.

Pencapaian sasaran strategis I ditunjukkan dengan capaian indikator kinerja utama (IKU) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang rata-rata memperoleh kriteria Memuaskan, walaupun ada 1 indikator bernilai Cukup. Dengan capaian ini terlihat bahwa Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru perlu melakukan perbaikan dalam pelaksanaan tupoksinya karena masih ditemukan produk DMKA yang ilegal maupun tidak memenuhi syarat/ketentuan/substandar.

Pencapaian sasaran strategis II ditunjukkan dengan capaian indikator kinerja utama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang memperoleh kriteria Memuaskan. IKU untuk sasaran strategis II ini yaitu tingkat kepuasan masyarakat dan Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan.

Pencapaian sasaran strategis III ditunjukkan dengan capaian indikator kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang memperoleh kriteria Cukup. Tetapi indikator kinerja untuk sasaran strategis III ini sebenarnya belum menggambarkan kondisi sesungguhnya karena hanya didasarkan pada nilai SAKIP, padahal kapasitas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru tentu tidak hanya ditentukan oleh nilai SAKIP.

Untuk sasaran strategis 3 Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM, diperoleh capaian kinerja dengan kriteria cukup, hal ini disebabkan karena Target nilai SAKIP yang ditetapkan adalah A sementara faktor pendukung untuk mencapai nilai A belum ada seperti penetapan indikator kinerja individu.

Selain IKU, capaian sasaran strategis juga ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja kegiatan yaitu :

- a. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis, dimana target tidak tercapai karena kurangnya fasilitas laboratorium dan kompetensi penguji
- b. Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK), dimana target tercapai dengan kriteria baik.
- c. Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan, dimana target tercapai dengan kriteria baik.
- d. Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan, dimana target tercapai dengan kriteria baik.
- e. Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan, dimana target tidak tercapai karena adanya hambatan dalam menghadirkan/ menemukan tersangka untuk dilakukan pemeriksaan (BAP Tersangka) sehingga terhadap kasus tersebut belum dapat diterbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).
- f. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan, dimana target tercapai dengan kriteria baik
- g. Jumlah Layanan Publik, dimana target tercapai dengan kriteria memuaskan
- h. Jumlah Komunitas yang Diberdayakan, dimana target tercapai dengan kriteria baik
- i. Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana sesuai Standar, dimana realisasi melebihi target.
- j. Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Evaluasi yang Dilaporkan Tepat Waktu, dimana target tercapai dengan kriteria baik.



Realisasi penyerapan anggaran untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 35.513.694.370 atau 90,98 %. Tingkat efisiensi kegiatan berada pada kategori efisien.

Kendala/ hambatan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan :

1. Tata Hubungan Kerja antar bidang/ sub bagian tata usaha belum tertata dengan baik seperti :
 - a. Kesalahan dalam menginput parameter uji dan keterlambatan dalam memverifikasi data secara SIPT.
 - b. Keterlambatan pendistribusian surat ke bidang – bidang.

Untuk itu Balai Besar PDM di Pekanbaru telah menetapkan langkah – langkah strategis guna menanggulangi masalah tersebut antara lain:

- a. Memberikan bimbingan teknis terkait SIPT kepada petugas terkait.
 - b. Melakukan evaluasi rutin kinerja dan optimalisasi Sistem Manajemen Mutu (QMS) termasuk update SOP Mikro dan dokumen terkait serta komitmen pejabat struktural.
2. Jumlah dan Kompetensi SDM masih kurang.

Untuk itu Balai Besar PDM di Pekanbaru telah menetapkan langkah – langkah strategis guna menanggulangi masalah tersebut antara lain:

- a. Memaksimalkan SDM yang ada .
 - b. Meningkatkan kompetensi SDM .
3. Kerjasama dengan lintas sektor terkait masih kurang seperti belum terkoordinirnya tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh instansi terkait yaitu Dinas Kesehatan Kab/ Kota. Untuk mengatasinya ditingkatkan komunikasi dan kerjasama dengan pihak Dinkes kab/ Kota melalui Sosialisasi/FGD dan dilakukan secara berkala dan terjadwal.



HIGHLIGHT / MILESTONES

Beberapa milestones/capaian sebagai bukti kinerja/mendukung kinerja Balai Besar PDM di Pekanbaru sebagai berikut :

- a. Hasil temuan penyidikan selama tahun 2017 dengan nilai sekitar Rp. 7.632.876.189. Nilai temuan tertinggi pada kasus pangan sekitar Rp. 6.029.455.000.
- b. Memperoleh Sertifikat ISO 9001:2015 terkait konsistensi dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dari PT.TÜV SÜD Indonesia (Sertifikat belum dikirimkan).
- c. Memperoleh Sertifikat Perluasan Tanah Gedung Balai Besar PDM di Pekanbaru seluas 1.913 m² (Lampiran Sertifikat).
- d. Sudah diterapkannya Penetapan Indikator Kinerja Eselon 3 dan 4 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja yang mengadap dari Indikator Kinerja Eselon 2.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah non Departemen yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, tugas Balai Besar POM di Pekanbaru adalah melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapan, narkotika, psikoaktif, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya. Dalam melaksanakan tugasnya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru mempunyai fungsi :

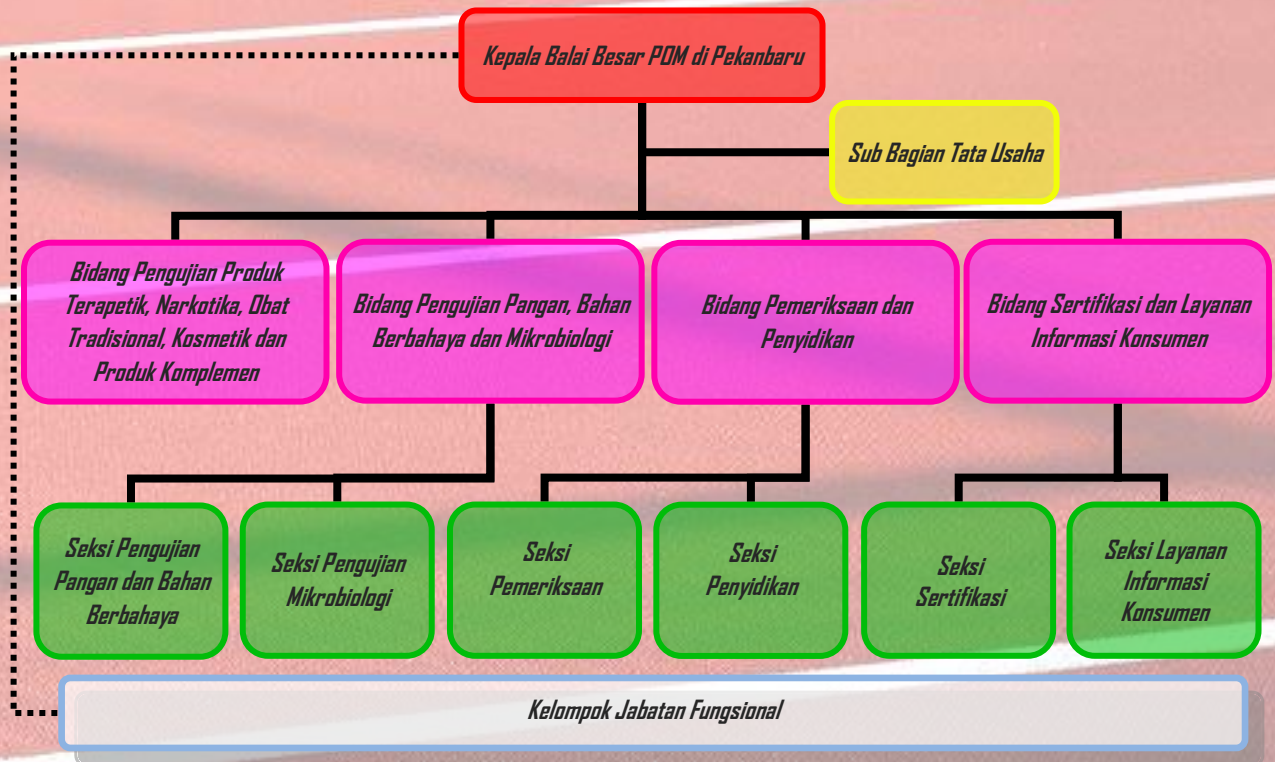
- Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan,
- Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan,
- Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BBPOM di Pekanbaru,
- Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan,
- Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Wilayah Kerja Balai Besar POM di Pekanbaru



- Kabupaten Kampar
- Kabupaten Pelalawan
- Kabupaten Bengkalis
- Kabupaten Rokan Hulu
- Kabupaten Rokan Hilir
- Kabupaten Indragiri Hulu
- Kabupaten Indragiri Hilir
- Kabupaten Siak
- Kabupaten Kuantan Singingi
- Kabupaten Kepulauan Meranti
- Kota Pekanbaru
- Kota Dumai

1.2 Struktur Organisasi



Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut di atas dilakukan sesuai Struktur Organisasi Balai Besar POM di Pekanbaru. Struktur Organisasi Balai Besar POM di Pekanbaru disusun berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.00.05.21.4232 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : 05018/SK/KBPOM tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM. Sesuai dengan struktur yang ada, unit-unit kerja Balai Besar POM di Pekanbaru dikelompokkan sebagai berikut :

1. Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen.

Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

Pelaksanaan dan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pengelolaan laboratorium dan pengendalian mutu hasil pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen.

2. Bidang Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang pangan dan bahan berbahaya serta pemeriksaan laboratorium pengujian dan pengendalian mutu di bidang mikrobiologi.

Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan dan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pengelolaan laboratorium dan pengendalian mutu hasil pengujian pangan dan bahan berbahaya.
- Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pengelolaan laboratorium dan pengendalian mutu hasil pengujian mikrobiologi.

Bidang Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi terdiri dari :

- i. **Seksi Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya**
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pengelolaan laboratorium dan pengendalian mutu hasil pengujian pangan dan bahan berbahaya.
 - ii. **Seksi Pengujian Mikrobiologi**
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pengelolaan laboratorium dan pengendalian mutu hasil pengujian mikrobiologi.
- 3. Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan**
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, dan pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan pelayanan kesehatan serta penyidikan kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapeutic, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.
Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
- a. Menyusun rencana dan program pemeriksaan dan penyidikan obat dan makanan.
 - b. Pemeriksaan setempat pengambilan contoh untuk pengujian, dan pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan pelayanan kesehatan dibidang produk terapeutic, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.
 - c. Pelaksanaan penyidikan kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapeutic, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.
 - d. Evaluasi dan penyusunan laporan pemeriksaan dan penyidikan obat dan makanan.
- Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan terdiri dari :
- i. **Seksi Pemeriksaan**
Mempunyai tugas melakukan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, dan pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan pelayanan kesehatan dibidang produk terapeutic, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya
 - ii. **Seksi Penyidikan**
Mempunyai tugas melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapeutic, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya
- 4. Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen**
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu, serta layanan informasi konsumen
Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan rencana dan program sertifikasi produk dan layanan informasi konsumen.
 - b. Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu.
 - c. Pelaksanaan Layanan Informasi Konsumen.
 - d. Evaluasi dan penyusunan laporan sertifikasi produk dan layanan informasi konsumen.
- Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen terdiri dari :
- i. **Seksi Sertifikasi**
Mempunyai tugas melakukan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu.
 - ii. **Seksi Layanan Informasi Konsumen**
Mempunyai tugas melakukan layanan informasi konsumen.
- 5. Sub Bagian Tata Usaha**
Mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi di lingkungan Balai Besar POM di Pekanbaru.

6. Kelompok jabatan Fungsional

Melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan jabatan fungsional lain sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada poin a dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- c. Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada poin a, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada poin a diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3 Aspek Strategis Organisasi

Balai Besar POM di Pekanbaru sebagai unit pelaksana teknis Badan POM dengan cakupan wilayah kerja propinsi Riau dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai beberapa aspek strategis yang harus diperhatikan untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas. Beberapa poin penting yang menjadi perhatian adalah :

- a. Pengawasan entry point. Letak geografis propinsi Riau yang berbatasan dengan Singapura dan Malaysia dan banyaknya pelabuhan – pelabuhan kecil menimbulkan kesulitan tersendiri untuk mengawasi langsung keluar masuknya produk obat dan makanan dari dan ke provinsi Riau. Kondisi ini diperparah dengan adanya era globalisasi yang mengakibatkan frekuensi intensitas dan arus lalu lintas barang antar negara cenderung semakin meningkat sebagai akibat menipisnya entry barrier. Untuk itu diperlukan strategi dalam melakukan pengawasan entry point meliputi strategi di lapangan dan secara administrasi. Strategi di lapangan dilakukan dengan cara :
 1. Meningkatkan sinergitas dengan Bea Cukai
 2. Mengajak operasi bersama secara berkala dengan seluruh lintas sektor penegak hukum di provinsi RiauSecara administrasi, sebelumnya sudah dilakukan melalui pengeluaran dokumen SKI/ SKE tapi masih perlu meningkatkan komunikasi dengan linsek terkait administrasi SKI/ SKE tersebut dan juga untuk pengeluaran barang tentengan. Selain itu juga tetap diperlukan untuk meningkatkan program Komunikasi, Informasi, Edukasi dalam hal pemasukan produk obat dan makanan luar negeri ke Indonesia
- b. Dalam rangka memaksimalkan tugas pengawasan di daerah dirasa perlu untuk mendirikan Balai POM daerah. Untuk itu telah diusulkan pendirian Balai POM daerah di kabupaten Indragiri Hilir (Tembilahan) dan Kota Dumai. Adapun alasan pemilihan kabupaten/ kota tersebut adalah :
 1. Trend temuan kasus penyalahgunaan Obat dan Makanan terbanyak
 2. Jumlah pelabuhan tikus tempat masuk produk obat dan makanan dari luar negeri cukup banyak
 3. Jarak tempuh yang cukup jauh dari Pekanbaru (Pekanbaru – Tembilahan sekitar 8 jam perjalanan)
 4. Terdapatnya industri pangan penghasil santan terbesar di dunia (PT. Pulau Sambu Tembilahan)Diharapkan dengan adanya Balai POM kabupaten, hubungan kerja yang harmonis dengan instansi lain terkait tugas pengawasan produk obat dan makanan akan lebih terjalin sehingga visi misi Badan POM dapat tercapai.
- c. Terkait kasus PCC untuk propinsi Riau secara umum belum ditemukan kasus dimaksud. Hanya ditemukan satu orang membawa obat PCC sejumlah 10 tablet. Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan oleh Polsek Kampar
- d. Berdasarkan data hasil temuan produk obat dan makanan tahun 2017 dengan nilai tangkapan sebesar Rp 7.632.876.189 diperoleh hasil tangkapan pangan illegal mendominasi dengan nilai sekitar Rp 6.029.455.000, Obat

keras Daftar G Rp 604.362.689, kosmetik illegal Rp 814.008.000, Obat Tradisional illegal Rp 139.930.500, Suplemen Makanan illegal Rp 35.520.000 dan Obat illegal Rp 9.600.000.

1.4 Analisis Lingkungan Strategis

1.4.1. Internal

a. Tata Hubungan Kerja antar bidang/ sub bagian tata usaha belum tertata dengan baik.

Tata hubungan kerja secara internal antara bidang dan sub bagian tata usaha di Balai Besar POM di Pekanbaru belum tertata dengan baik, hal ini bisa terlihat dari masih adanya kesalahan dalam menginput parameter uji dan keterlambatan dalam memverifikasi data secara SIPT, keterlambatan pendistribusian surat ke bidang – bidang sehingga informasi terlambat diterima dan atau tindak lanjut permintaan data melebihi timeline yang diberikan. Untuk itu Balai Besar POM di Pekanbaru telah menetapkan langkah – langkah strategis guna menanggulangi masalah tersebut dengan memberikan bimbingan teknis terkait SIPT kepada petugas terkait, melakukan evaluasi rutin kinerja dan optimalisasi Sistem Manajemen Mutu (QMS) termasuk update SOP Mikro dan dokumen terkait serta komitmen pejabat struktural.

b. Jumlah dan Kompetensi SDM masih kurang.

Dari hasil analisa beban kerja tahun 2017 yang didasarkan pada cakupan wilayah kerja, peta jabatan serta tugas pokok dan fungsi dibutuhkan 163 orang pegawai. Jumlah pegawai yang ada hanya 89 orang sehingga masih terdapat kekurangan sejumlah 74 orang. Oleh karena itu tugas pengawasan obat dan makanan di propinsi Riau belum memberikan hasil yang maksimal. Kondisi ini ditambah dengan jumlah tenaga yang kompeten untuk beberapa tugas tertentu seperti pemeriksaan penerapan CDOB juga masih sangat kurang karena dari sekitar 50 PBF yang ada di Provinsi Riau jumlah inspektur CDOB hanya 10 orang.

c. Sistem Mutu seluruh bagian belum berjalan dengan baik.

Balai Besar POM di Pekanbaru telah menerapkan sistem mutu untuk memastikan bahwa pekerjaan dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai SOP yang ada tetapi dalam penerapannya masih ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan SOP yang ada. Untuk mengurangi temuan ketidaksesuaian diperlukan komitmen seluruh karyawan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SOP.

d. Sarana dan Prasarana masih belum memadai

Sarana dan prasarana merupakan unsur penting dalam mendukung keberhasilan kegiatan dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Pemenuhan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan di Balai Besar POM di Pekanbaru pada tahun 2017 dari target 84 % tercapai sebesar 95,96 %.

e. Penerapan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) belum berjalan dengan baik.

Dalam rangka mempertahankan predikat WTP dan agar seluruh kegiatan berjalan efektif, efisien, keandalan laporan keuangan, ketaatan peraturan, dan pengamanan aset dapat tercapai lebih baik lagi perlu ditingkatkan penerapan SPIP di lingkungan Balai Besar POM di Pekanbaru. Untuk itu diperlukan sosialisasi kepada seluruh karyawan/ti dan honorer di lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru.

1.4.2. Eksternal

Kondisi Demografis

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru mempunyai wilayah kerja di Provinsi Riau. Luas wilayah Provinsi Riau adalah 107.932,71 Km² yang membentang dari lereng Bukit Barisan hingga Selat Malaka, ini membuat Provinsi Riau berada pada jalur yang sangat strategis karena terletak pada jalur perdagangan Regional dan Internasional di kawasan ASEAN. Memiliki Luas daratan 89.150,15 Km² dan luas lautan 18.782,56 Km². Terdapat 15 (lima belas) sungai yang 4 (empat) diantaranya dapat digunakan sebagai prasarana perhubungan, yaitu :

1. Sungai Siak (300 Km) dengan kedalaman 8 – 12 m,

2. Sungai Rokan (400 Km) dengan kedalaman 6 – 8 m,
3. Sungai Kampar (400 Km) dengan kedalaman 6 m dan,
4. Sungai Indragiri (500 Km) dengan kedalaman 6 – 8 m.

Jumlah penduduk Provinsi Riau tahun 2016 adalah 6.500.971 jiwa. Jumlah penduduk terbesar berada di Kota Pekanbaru dengan 1.064.566 jiwa, kemudian diikuti oleh Kabupaten Kampar dengan jumlah penduduk 812.702 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terkecil berada di Kepulauan Meranti dengan 182.152 jiwa.

Data Penduduk Tahun 2016 di Propinsi Riau

(Sumber : *BPS Provinsi Riau-Propinsi Riau Dalam Angka 2017)



■ Kuantan Singingi (Pria : 163213 - Wanita : 154722 / Jumlah : 317935)
■ Indragiri Hulu (Pria : 214402 - Wanita : 203331 / Jumlah : 417733)
■ Indragiri Hilir (Pria : 366043 - Wanita : 346991 / Jumlah : 713034)
■ Pelalawan (Pria : 214268 - Wanita : 203230 / Jumlah : 417498)
■ Siak (Pria : 232553 - Wanita : 220499 / Jumlah : 453052)
■ Kampar (Pria : 417085 - Wanita : 395617 / Jumlah : 812702)
■ Rokan Hulu (Pria : 316506 - Wanita : 299960 / Jumlah : 616466)
■ Bengkalis (Pria : 283225 - Wanita : 268458 / Jumlah : 551683)
■ Rokan Hilir (Pria : 339900 - Wanita : 322342 / Jumlah : 662242)
■ Kepulauan Meranti (Pria : 93488 - Wanita : 88664 / Jumlah : 182152)
■ Pekanbaru (Pria : 546400 - Wanita : 518166 / Jumlah : 1064566)
■ Dumai (Pria : 149791 - Wanita : 142117 / Jumlah : 291908)

Kondisi wilayah Riau dibandingkan dengan jumlah petugas Balai Besar POM di Pekanbaru sangat tidak memadai. Total jumlah SDM di Balai Besar POM 89 orang dan yang bertugas untuk melakukan pengawasan OMKABA di lapangan (Bidang Pemdik) sejumlah 17 orang. Beban kerja yang berat ini juga ditambah dengan banyaknya pelabuhan tikus (tak resmi) karena banyaknya perairan di provinsi Riau. Jumlah sarana produksi yang ada di Provinsi Riau terdiri dari IKOT 1 sarana dan Industri Pangan 169 sarana. Jumlah sarana distribusi sekitar 4643 sarana. Berdasarkan hasil analisis resiko dan keterbatasan SDM yang ada maka ditetapkan cakupan pengawasan sarana produksi OMKA sebesar 63% dan sarana distribusi OMKA sebesar 28%.

1.5 Isu Strategis

Beberapa permasalahan/ isu strategis yang harus dihadapi oleh BBPOM di Pekanbaru yaitu :

a. Kemajuan Bidang Teknologi Produksi dan Transportasi.

Perkembangan kemajuan teknologi produksi dan transportasi sangat pesat ditandai dengan semakin banyaknya jumlah dan jenis peralatan produksi yang mampu menghasilkan berbagai jenis produk inovasi baru dan memungkinkan penyebaran suatu produk secara mudah dan cepat. Oleh karenanya petugas pengawas perlu dibekali dengan pengetahuan dan keahlian yang memadai untuk mengantisipasi perkembangan teknologi tersebut.

b. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha.

Masih rendahnya pengetahuan pelaku usaha dibidang cara produksi yang baik serta kesadaran akan penerapan cara produksi yang baik berakibat masih banyak sarana produksi yang tidak memenuhi syarat serta masih ditemukannya penggunaan bahan berbahaya dalam proses produksinya.

Demikian juga disektor distribusi peran pelaku usaha sangat besar dalam menyaring produk yang diedarkan serta dalam tatalaksana cara distribusi yang baik. Kondisi ini diharapkan semakin berkurang dengan semakin ditambahnya kegiatan pembinaan kepada pelaku usaha melalui sosialisasi/ penyuluhan.

c. Tuntutan Masyarakat tentang Keamanan Pangan.

Tuntutan masyarakat terhadap pangan semula hanya pada segi harga, rasa dan trend gaya hidup. Namun saat ini lebih kepada keamanan dan mutu pangan. Hal ini karena tingkat pendidikan masyarakat semakin baik, ditambah lagi dengan semakin banyaknya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memberikan bekal pengetahuan kepada masyarakat dalam memilih produk maupun hak dan kewajibannya sebagai konsumen.

d. Beredarnya Produk Ilegal.

Propinsi Riau merupakan Propinsi yang berbatasan dengan Negara Tetangga sehingga sangat rentan terhadap beredarnya produk ilegal atau tanpa izin edar. Dengan masih ditemukannya produk pangan, obat tradisional dan kosmetik tanpa izin edar baik produk lokal maupun impor menunjukkan bahwa Propinsi Riau merupakan pangsa pasar yang cukup baik. Oleh karenanya diperlukan pengawasan post market yang lebih efektif dan efisien sehingga mampu menekan peredaran produk tanpa izin edar.

e. Perkembangan Teknologi Promosi.

Kemajuan teknologi promosi sebagai sarana provider induced demand semakin efektif dalam menggugah masyarakat. Hal ini potensial mengarah pada penggunaan produk secara irrasional. Disamping itu kecanggihan teknologi promosi dapat menutupi berbagai kelemahan produknya. Keadaan ini semakin menurunkan tingkat kewaspadaan konsumen yang sudah tereksploitasi untuk melakukan pembelian produk. Oleh karenanya peran Balai Besar POM di Pekanbaru dan instansi terkait sangat penting dalam memberikan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada masyarakat.

f. Perkembangan Teknologi Informasi.

Kemajuan teknologi informasi dan penggunaan layanan on-line dalam distribusi produk DMKABA juga menjadi permasalahan baru bagi BBPOM di Pekanbaru karena peraturan yang belum cukup dan beredarnya berita HOAX terkait DMKABA.

BAB II

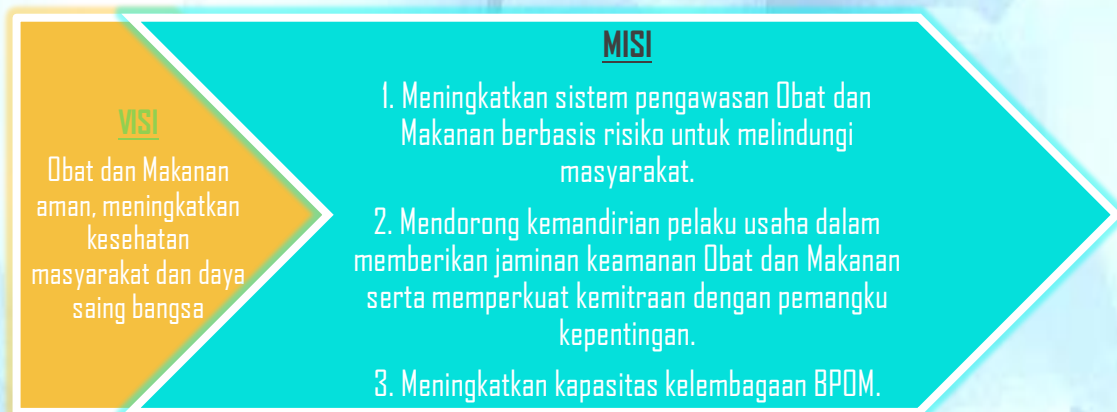
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru mempunyai Rencana Strategis (Renstra) yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2015 - 2019 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala atau tantangan yang ada atau yang mungkin timbul.

Renstra Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru disusun mengacu pada Renstra Badan POM 2015 - 2019. Dalam pelaksanaannya maka pada tahun 2017 telah dilakukan reuiu Renstra terkait perubahan target kegiatan yang disesuaikan dengan hasil evaluasi dan pencapaian target tahun 2015, 2016 sampai dengan November 2017. Adapun hasil reuiu tersebut masih menunggu feed back dari Badan POM (Lampiran 9).

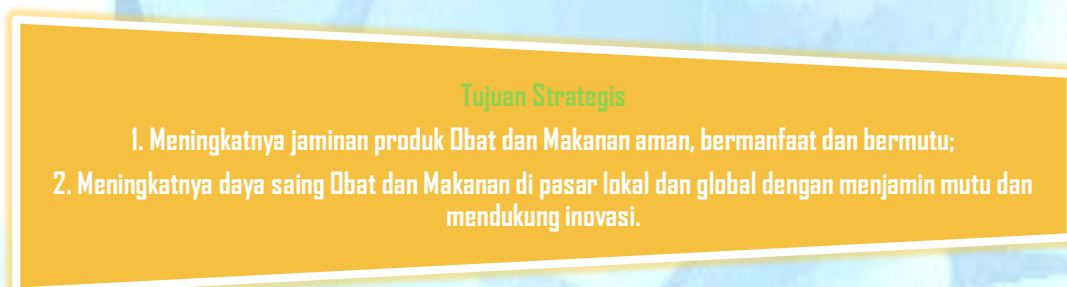
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru selaku Unit Pelaksana Teknis Badan POM mempunyai visi dan misi yang sama dengan Badan POM. Untuk merealisasikan visi misi tersebut telah ditetapkan sasaran strategis beserta masing - masing indikatornya sesuai dengan Renstra Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dapat dijabarkan sebagai berikut :



Visi dan Misi Balai Besar POM di Pekanbaru

2.1.1 Tujuan Strategis

Tujuan strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru adalah sebagai berikut :



Tujuan Strategis Balai Besar POM di Pekanbaru

2.1.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

Sasaran strategis Balai Besar POM di Pekanbaru merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Balai Besar POM di Pekanbaru. Sasaran-sasaran yang ditetapkan harus dapat mendukung pencapaian tujuan strategis tersebut. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan tercapai diharapkan bahwa tujuan strategis yang terkait juga dapat dicapai. Untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran perlu ditetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan. Secara keseluruhan sasaran strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru sesuai dengan Rencana Strategis 2015-2019 dapat dilihat pada Lampiran I.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis Balai Besar POM di Pekanbaru untuk Tahun 2017 dijabarkan sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase obat yang memenuhi syarat, dengan target 96 %, 2. Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat, dengan target 82 %, 3. Persentase kosmetik yang memenuhi syarat, dengan target 91 %, 4. Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat, dengan target 94 %, 5. Persentase makanan yang memenuhi syarat, dengan target 89,1 %.
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan serta partisipasi masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Kepuasan Masyarakat, dengan target 85 %. 2. Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan
Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BBPOM di Pekanbaru.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai SAKIP BBPOM di Pekanbaru dari Badan POM : A

Sasaran dan tujuan dapat dicapai dengan menetapkan arah kebijakan strategis. Arah kebijakan strategis Balai Besar POM di Pekanbaru disusun menyesuaikan arah kebijakan strategis dan strategi Badan POM sebagai berikut:

Arah Kebijakan BPOM yang akan dilaksanakan :

1. Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat.
2. Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan daya saing produk Obat dan Makanan.
3. Peningkatan Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi publik melalui kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
4. Penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan Obat dan Makanan melalui penataan struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi serta pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien.

Strategi

1. Eksternal :
 - a. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor terkait pengawasan Obat dan Makanan;
 - b. Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan;
2. Internal :
 - a. Penguatan Regulatory System pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko;
 - b. Membangun Manajemen Kinerja dari Kinerja Lembaga hingga kinerja individu/pegawai;

- c. Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif dan akuntabel serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai;
- d. Meningkatkan kapasitas SDM pengawas BPOM di tingkat pusat dan daerah secara lebih proporsional dan akuntabel;
- e. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana utama maupun pendukung dalam pelaksanaan tugas Pengawasan Obat dan Makanan.

Definisi Operasional indikator pengukuran kinerja dijabarkan sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU/IKK	DEFINISI OPERASIONAL
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan.	1.1. Persentase obat yang memenuhi syarat	<p>a. Obat yang mendapatkan NIE dari Badan POM.</p> <p>b. Yang dimaksud dengan obat adalah obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, psikotropika dan narkotika (tidak termasuk DT).</p> <p>c. Obat Memenuhi Syarat (MS) ditetapkan melalui uji laboratorium.</p> <p>d. Kategori obat yang disampling sesuai dengan pedoman prioritas sampling.</p> <p>e. Jumlah produk obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets</p>
		1.2. Persentase produk Obat Tradisional yang memenuhi syarat	<p>a. Obat Tradisional yang memenuhi syarat ditetapkan melalui pengujian laboratorium.</p> <p>b. Persentase dihitung melalui perbandingan antara jumlah Obat Tradisional yang memenuhi syarat dengan jumlah total Obat Tradisional yang disampling pada tahun berjalan (n).</p>
		1.3. Persentase produk Kosmetik yang memenuhi syarat	<p>a. Kosmetik yang memenuhi syarat ditetapkan melalui pengujian laboratorium.</p> <p>b. Persentase dihitung melalui perbandingan antara jumlah Kosmetik yang memenuhi syarat dengan jumlah total Kosmetik yang disampling pada tahun berjalan (n).</p>
		1.4. Persentase produk Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	<p>a. Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat ditetapkan melalui pengujian laboratorium.</p> <p>b. Persentase dihitung melalui perbandingan antara jumlah Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat dengan jumlah total Suplemen Kesehatan yang disampling pada tahun berjalan (n).</p>
		1.5. Persentase makanan yang memenuhi syarat	<p>a. Makanan adalah pangan olahan yang mendapatkan NIE dari Badan POM.</p> <p>b. Makanan MS ditetapkan melalui uji laboratorium.</p> <p>c. Kategori produk makanan yang diuji disesuaikan dengan kategori pangan.</p>

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU/IKK	DEFINISI OPERASIONAL	
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	2.1.	Tingkat Kepuasan Masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman terkini.
		2.2.	Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	<p>Provinsi adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia yang dipimpin oleh Gubernur.</p> <p>Kabupaten/ Kota adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah provinsi yang dipimpin oleh Bupati/ Kota.</p> <p>Komitmen untuk pelaksanaan adalah perjanjian (keterikatan) Kota/ Kabupaten untuk melakukan pelaksanaan pengawasan obat, kosmetik, obat tradisional, pangan dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan, baik yang dilakukan secara mandiri dan atau terpadu melalui pengawasan/ pemeriksaan, advokasi/ penyuluhan, pembentukan tim terpadu, pertemuan dan kegiatan lainnya yang dapat memperkuat pengawasan.</p> <p>Alokasi anggaran adalah alokasi anggaran daerah baik yang berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat, yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.</p>
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	3.1.	Nilai SAKIP BPOM	Nilai SAKIP diukur berdasarkan hasil penilaian SAKIP yang dilakukan oleh APIP Badan POM.
		1	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	<p>a. Parameter kritis adalah parameter uji yang bersifat sebagai penentu terhadap jaminan keamanan, manfaat, dan mutu produk yang diuji.</p> <p>b. Parameter kritis ditetapkan dalam pedoman sampling Obat dan Makanan (juga menjelaskan "penentu" terhadap jaminan keamanan, manfaat, dan mutu produk yang diuji).</p>
		2	Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (Instalasi Farmasi Kabupaten)	<p>Diukur berdasarkan jumlah sampel yang diambil pada IFK (termasuk gudang obat KB) dibandingkan dengan target sampel yang harus disampling di sarana sektor publik di masing-masing balai.</p> <p>Target sampel yang harus disampling di sarana sektor publik untuk masing-masing balai ditetapkan dalam Pedoman Sampling.</p>
3	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	a. Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana produksi (Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional (IOT), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Kosmetika, Industri Pangan olahan MD, dan Industri Rumah Tangga Pangan.		

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU/IKK	DEFINISI OPERASIONAL
			<p>b. Sarana produksi yang diperiksa setiap tahun ditetapkan berdasarkan kriteria Pedoman Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan</p> <p>c. Cakupan pengawasan sarana produksi pertahun dihitung dari jumlah sarana produksi yang diperiksa dibandingkan dengan jumlah sarana produksi yang terdapat di wilayah tersebut.</p> <p>d. Untuk penetapan target sarana produksi pangan MD dan IRTP yang diperiksa mengikuti ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - untuk balai yang memiliki sarana produksi MD <51, target sarana produksi pangan MD diperiksa sebesar 100%, sisa target pemeriksaan diambil dari sarana produksi IRTP - untuk balai yang memiliki sarana produksi MD 101-150, target sarana produksi pangan MD diperiksa sebesar 80%, sisa target pemeriksaan diambil dari sarana produksi IRTP - untuk balai yang memiliki sarana produksi MD >150, target sarana produksi pangan MD diperiksa sebesar 70%, sisa target pemeriksaan diambil dari sarana produksi IRTP
4	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan		<p>a. Sarana Distribusi Obat dan Makanan terdiri atas: Jumlah sarana distribusi Obat (PBF dan Instalasi Farmasi Pemerintah) dan sarana Pelayanan Kesehatan (Apotek, Toko Obat Berizin, Klinik, Instalasi Farmasi Rumah Sakit dan Puskesmas), klinik kecantikan, spa, salon, pengobat tradisional, toko jamu, depot jamu, stokis MLM, Toko Modern (Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket), Toko Grosir, Toko Tradisional (Toko P & D dan Kios), Importir (termasuk importir terdaftar bahan berbahaya), distributor dan pengecer yang memiliki SIUP-B2, baik perusahaan induk maupun perusahaan cabang.</p> <p>b. Sarana yang diperiksa setiap tahun ditetapkan berdasarkan kriteria Pedoman Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan serta Pedoman Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya.</p> <p>c. Jumlah Sarana distribusi yang diperiksa adalah sarana distribusi yang diperiksa dalam rangka pemeriksaan rutin.</p>
5	Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan		<p>a. Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus.</p> <p>b. Jumlah perkara yang dihitung adalah perkara yang telah diterbitkan SPDP-nya kepada Kejaksaan melalui Korwas PPNS.</p>

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU/IKK	DEFINISI OPERASIONAL
6	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar		<p>a. Standar yang dimaksud adalah standar sarana prasarana kerja dan standar alat laboratorium (sesuai GLP)</p> <p>b. Pemenuhan sarana dan prasarana kerja dihitung dari sarana dan prasarana kerja yang dimiliki sesuai laporan BMN dalam keadaan baik dan rusak ringan dibandingkan dengan standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Standar Sarana dan Prasarana kerja meliputi standar Luas bangunan, Meubelair, dan Alat Pengolah Data (APD)</p> <p>d. Untuk meubelair dihitung dari inventarisasi pemenuhan kursi dan meja</p> <p>e. Pemenuhan standar alat laboratorium dihitung dari jumlah dan jenis alat laboratorium utama sesuai Keputusan Kepala BPOM No.04.1.71.07.14.4437 Tahun 2014 tentang Standar Minimal Peralatan Laboratorium Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM yang telah ditetapkan untuk masing-masing balai.</p>
7	Jumlah layanan publik BB/BPOM		<p>a. Layanan publik terdiri dari Layanan informasi, Layanan Sertifikasi, dan layanan pengujian pihak ketiga</p> <p>b. Layanan Informasi diukur berdasarkan jenis dan frekuensi layanan informasi dan tindak lanjut pengaduan yang dilakukan oleh Balai Besar/Balai POM baik penyuluhan langsung atau melalui media cetak/elektronik.</p> <p>c. Jenis layanan Informasi antara lain: Talkshow, Pameran, Penyuluhan, Bimtek, Iklan layanan masyarakat, layanan informasi, tindak lanjut pengaduan, BB/BPOM sebagai Narasumber,</p> <p>d. Untuk Talkshow, Pameran, Penyuluhan, Bimtek, Iklan layanan masyarakat, layanan informasi targetnya frekuensi Untuk tindak lanjut pengaduan targetnya jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti</p> <p>e. Layanan Sertifikasi dihitung dari rekomendasi/surat hasil audit yang dikeluarkan atas permintaan pelaku usaha industri pangan MD; audit sertifikasi dalam rangka rekomendasi halal, pemenuhan pendirian PBF, IKOT, UMDT, Kosmetik: SKI/SKE yang diterbitkan</p> <p>f. Layanan pengujian sampel pihak ketiga dihitung dari Laporan Hasil Uji sampel pihak ketiga</p>
8	Jumlah Komunitas yang diberdayakan		<p>a. Komunitas adalah gabungan dari kelompok orang di desa/sekolah dasar/kelurahan/pasar yang diberdayakan Program Pengawasan Obat dan Makanan.</p> <p>b. Satu desa/sekolah dasar/kelurahan/pasar dihitung sebagai satu komunitas</p> <p>c. Jenis pemberdayaan diatur dalam Pedoman/Juknis terkait.</p> <p>Ctt: Untuk komunitas pasar: - Target komunitas pasar (Kumulatif) : 2016 (108); 2017 (139) ; 2018 (170); 2019 (201) - Baseline 2013 (62); 2014 (77); 2015 (77)</p>


NO	SASARAN STRATEGIS	IKU/IKK	DEFINISI OPERASIONAL
			- Target komunitas desa kumulatif
9	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dihasilkan dan harus dilaporkan Balai, meliputi dokumen berikut: - Renstra/review renstra,*) - Perjanjian Kinerja tahun berjalan (n), - RKAKL/DIPA tahun n+1 - Laporan Kinerja tahun n-1, - Laporan triwulanan I - Laporan triwulanan II - Laporan triwulanan III - Laptah tahun n-1, - Laporan keuangan tahun n-1, - Laporan Keuangan Semester I tahun n, Ket: *) hanya menjadi target pada tahun 2015, 2017, dan 2019 Renstra: 2015 Review Renstra: 2017 dan 2019	

Dari Indikator Kinerja diatas yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar PDM di Pekanbaru sesuai SK Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : HK.07.85.02.16.1.227 adalah :

1. Persentase obat yang memenuhi syarat.
2. Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat.
3. Persentase kosmetik yang memenuhi syarat.
4. Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat.
5. Persentase makanan yang memenuhi syarat.
6. Tingkat Kepuasan Masyarakat.
7. Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan.
8. Nilai SAKIP BBPDM.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 disusun mengacu pada Renstra dan DIPA Balai Besar PDM di Pekanbaru Tahun 2017. Perjanjian Kinerja ini merupakan kesepakatan antara Kepala Balai Besar PDM di Pekanbaru dengan Kepala Badan PDM terkait rencana kerja yang harus dicapai pada tahun 2017. Perjanjian Kinerja merupakan format yang menghubungkan antara Kegiatan, Sasaran dan Indikator Kinerja Output.



BADAN POM
Diponegoro No. 10 Pekanbaru 28111 Telp. 0761-21496 Fax. 0761 28755 E-mail : balaipom_pku@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Adrizal, Apt.,
Jabatan : Plt. Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru

Selanjutnya disebut pihak pertama.



Nama : Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P
Jabatan : Kepala Badan POM RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, 06 Januari 2017

 Kepala Badan POM Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P	 Pihak Pertama, Drs. Adrizal, Apt.
---	---

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU**

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017
1.	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat Dan Makanan	Persentase obat yang memenuhi syarat	96
		Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat	82
		Persentase kosmetika yang memenuhi syarat	91
		Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	94
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	89,10
2.	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat	85%
		Jumlah kabupaten/kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi obat dan makanan	2
3.	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan	Nilai SAKIP BBPOM di Pekanbaru dari Badan POM	A
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	3005
		Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	100%
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	63
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	28
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran obat dan makanan	Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan	19
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat			
1	Meningkatnya kerja sama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan publik BBPOM di Pekanbaru	1000
		Jumlah Komunitas yang diberdayakan	23
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan			
1	<i>Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan obat dan makanan</i>	<i>Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar</i>	84

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017
2	Penyusunan perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10

Kegiatan :
 1 Pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM di Pekanbaru

Anggaran :
 Rp. 37.823.243.000



Pekanbaru, 06 Januari 2017
 Kepala Badan POM
 Dr. Penny K. Lukito, M.C.P



Pekanbaru, 06 Januari 2017
 Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru
 Drs. Adrizal, Apt.

Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Pekanbaru Tahun 2017

2.3 Kriteria Pencapaian Indikator

Kriteria pencapaian indikator kinerja mengacu kepada hasil rapat yang telah disepakati bersama pada awal tahun 2016 yaitu :

Tabel 1. Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja

Kriteria	Capaian Target Indikator
Memuaskan	$100\% < X < 125\%$
Baik	100%
Cukup	$75\% \leq X < 100\%$
Kurang	$X < 75\%$
Tidak dapat disimpulkan	$X > 125\%$

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi Rencana Strategis

Capaian Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dalam melaksanakan program pengawasan obat dan makanan di Propinsi Riau pada tahun 2017 diukur melalui terpenuhinya indikator kinerja yang mendukung pencapaian 3 (tiga) sasaran strategisnya yaitu:

1. Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan
2. Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dan Partisipasi Masyarakat.
3. Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BBPOM di Pekanbaru

Capaian Kinerja Balai Besar POM di Pekanbaru terhadap ketiga Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2. Capaian Kinerja Balai Besar POM di Pekanbaru

SASARAN STRATEGIS	% CAPAIAN	KRITERIA
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	104,56	Memuaskan
Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, dan Partisipasi Masyarakat	101,33	Memuaskan
Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM	87,63	Cukup

Dari tabel diatas terlihat bahwa untuk 3 sasaran strategis yang telah ditetapkan maka Balai Besar POM di Pekanbaru dapat mencapai kriteria memuaskan untuk 2 sasaran strategis yaitu Menguatnya Sistem Pengawasan Obat Dan Makanan dan Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, dan Partisipasi Masyarakat, hal ini disebabkan oleh :

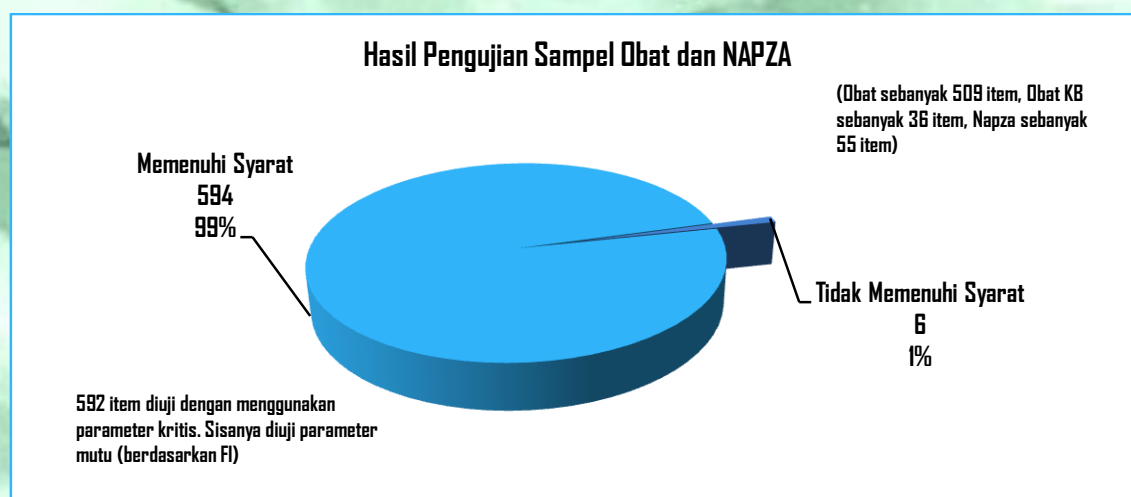
1. Secara umum sampling telah dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditentukan Badan POM.
2. Peningkatan kerjasama lintas sektor yang semakin intensif melalui operasi bersama terkait pengawasan Obat dan Makanan.
3. Peningkatan cakupan kegiatan KIE melalui mobil laboratorium keliling, komunitas pasar yang diberdayakan, GNPOPA, gerakan keamanan pangan desa, dll.
4. Peningkatan kompetensi petugas melalui pendidikan dan pelatihan baik yang terstruktur maupun tidak.
5. Penetapan target pengawasan Obat dan Makanan dilakukan sesuai dengan kondisi SDM dan anggaran yang tersedia bukan berdasarkan kondisi real di lapangan.

Untuk sasaran strategis III Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM, diperoleh capaian kinerja dengan kriteria cukup, hal ini disebabkan target nilai SAKIP yang ditetapkan adalah A sementara faktor pendukung untuk mencapai nilai A belum ada seperti penetapan indikator kinerja individu.

Analisis Akuntabilitas Kinerja
Sasaran Strategis I - Menguatnya Sistem Pengawasan Obat Dan Makanan
Indikator Kinerja Sasaran Strategis

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Persentase obat yang memenuhi syarat	96	97,9	101,98	Memuaskan
	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	82	93,6	114,15	Memuaskan
	Persentase kosmetik yang memenuhi syarat	91	99,2	109,01	Memuaskan
	Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	94	98,6	104,89	Memuaskan
	Persentase makanan yang memenuhi syarat	89,1	82,67	92,78	Cukup

1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

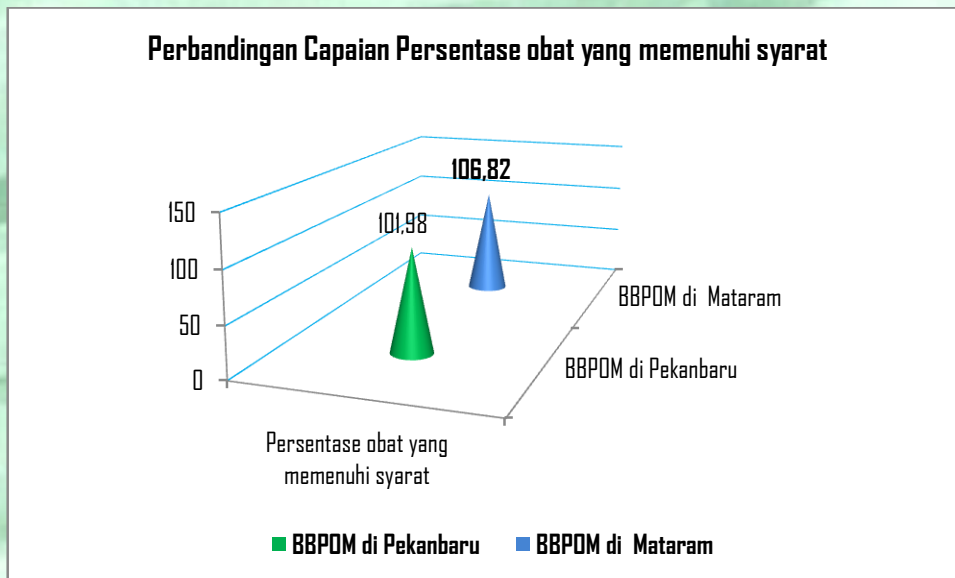


Obat	2015	2016	2017	2018	2019
Target	94,00%	95,00%	96,00%	97,00%	98,00%
Realisasi	99,83%	99,83%	99,00%		
Persentase Perbandingan (Realisasi/Target)	106,20%	105,08%	103,13%		
Persentase Perbandingan (Realisasi/Target 2019)				*101,02%	

Capaian tahun 2017 untuk indikator kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat adalah 99,00%. Hasil ini apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2015 (periode awal Renstra) sebesar 106,20%, tahun 2016 sebesar 105,08% menunjukkan capaian kinerja tidak mengalami perubahan bermakna (masih dalam kriteria memuaskan). Tetapi apabila dibandingkan dengan target tahun 2019 (periode akhir Renstra) yang sebesar 98,00% maka persentase capaian kerjanya adalah 101,02% terlihat bahwa realisasi melebihi target akhir. Berdasarkan data tersebut maka Balai Besar PDM di Pekanbaru perlu melakukan penyesuaian target.

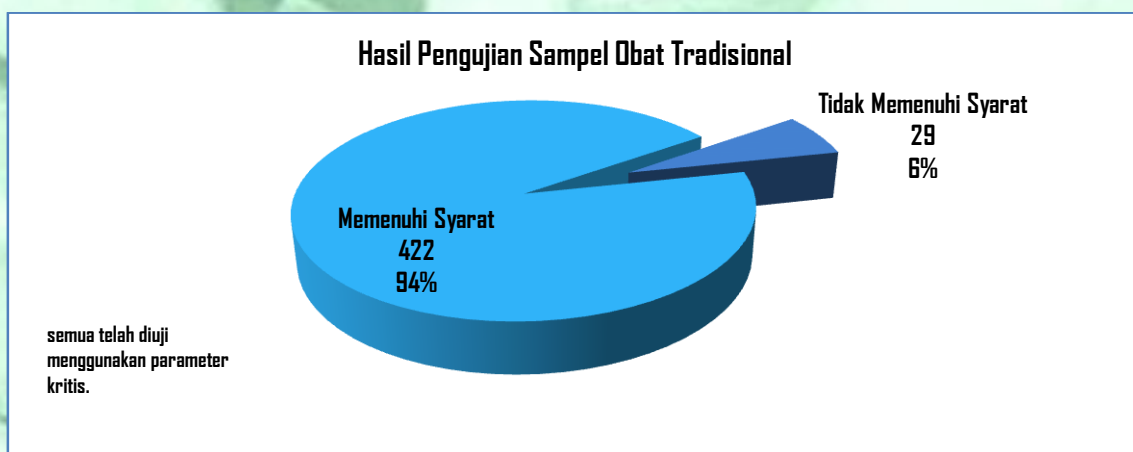
Pencapaian target Persentase Obat yang Memenuhi Syarat ini didukung oleh intensnya pengawasan sarana distribusi obat, perencanaan sampling obat yang dibuat berdasar analisis resiko dan kondisi SDM, penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang obat, pembinaan kepada pelaku usaha (regulatory assistance), advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor terkait dan pemberian KIE kepada masyarakat.

Untuk mempertahankan capaian kinerja ini maka Balai Besar POM di Pekanbaru memperkuat kerjasama lintas sektor terkait penegakan hukum, meningkatkan anggaran KIE untuk memperluas cakupan penyebaran informasi, merekomendasikan pemberian sanksi hukum yang memiliki kekuatan efek jera kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, terutama yang sudah berkali-kali ditegur dan diberi sanksi.



Perbandingan persentase obat yang memenuhi syarat antara Balai Besar POM di Pekanbaru dan BBPOM di Mataram tidak jauh berbeda dengan kriteria memuaskan.

2. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat

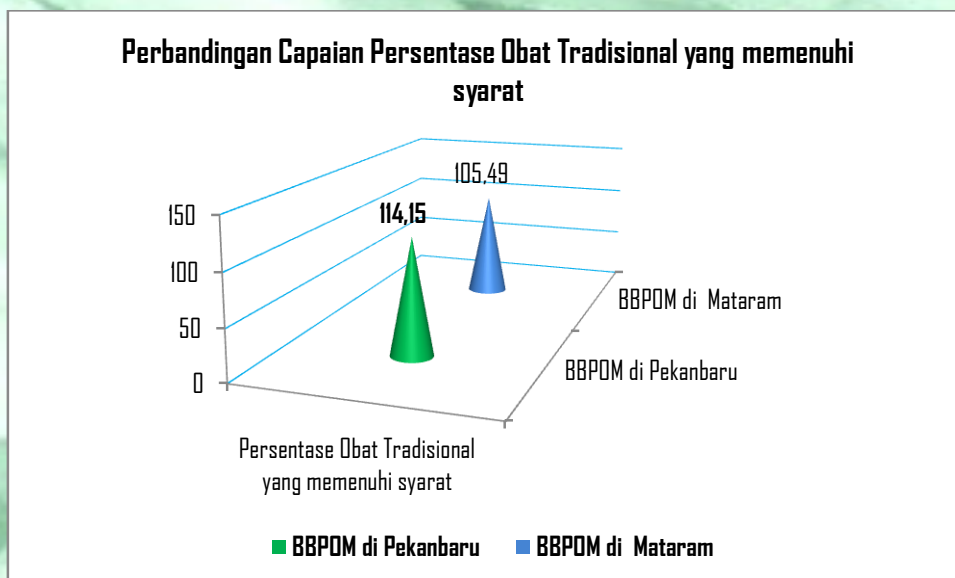


Obat Tradisional	2015	2016	2017	2018	2019
Target	80,00%	81,00%	82,00%	83,00%	84,00%
Realisasi	93,78%	93,11%	93,57%		
Persentase Perbandingan (Realisasi/Target)	117,23%	114,95%	114,11%		
Persentase Perbandingan (Realisasi/Target 2019)					*111,39%

Capaian tahun 2017 untuk indikator kinerja Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat adalah 93,57%. Hasil ini apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2015 (periode awal Renstra) sebesar 117,23% dan tahun 2016 sebesar 114,95% menunjukkan capaian kinerja secara persentase tidak mengalami perubahan bermakna (masih dalam kriteria memuaskan). Tetapi apabila dibandingkan dengan target tahun 2019 (periode akhir Renstra) yang sebesar 84,00% maka persentase capaian kinerjanya adalah 111,39%, ini berarti realisasi sudah melebihi target akhir. Berdasarkan data tersebut maka Balai Besar POM di Pekanbaru perlu melakukan penyesuaian target.

Pencapaian target Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat ini didukung oleh pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat Tradisional, penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Obat Tradisional, pembinaan kepada pelaku usaha (regulatory assistance), advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor terkait dan pemberian KIE kepada masyarakat.

Untuk mempertahankan capaian kinerja ini maka Balai Besar POM di Pekanbaru memperkuat kerjasama lintas sektor terkait penegakan hukum, meningkatkan anggaran KIE untuk memperluas cakupan penyebaran informasi dan merekomendasikan pemberian sanksi hukum yang memiliki kekuatan efek jera kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, terutama yang sudah berkali-kali ditegur dan diberi sanksi.



Perbandingan capaian persentase obat tradisional yang memenuhi syarat antara Balai Besar POM di Pekanbaru dan BBPOM di Mataram tidak jauh berbeda dengan kriteria memuaskan.

3. Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat



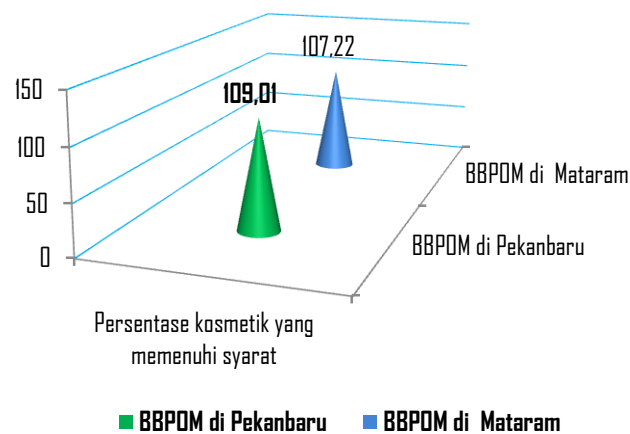
Kosmetik	2015	2016	2017	2018	2019
Target	89,00%	90,00%	91,00%	92,00%	93,00%
Realisasi	95,89%	97,11%	99,23%		
Persentase Perbandingan (Realisasi/Target)	107,74%	107,90%	109,04%		
Persentase Perbandingan (Realisasi/Target 2019)				*106,70%	

Capaian tahun 2017 untuk indikator kinerja Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat adalah 99,23%. Hasil ini apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2015 (periode awal Renstra) sebesar 107,74% dan tahun 2016 sebesar 107,90%, menunjukkan capaian kinerja tidak mengalami perubahan bermakna (masih dalam kriteria memuaskan). Tetapi apabila dibandingkan dengan target tahun 2019 (periode akhir Renstra) yang sebesar 93,00% maka persentase capaian kinerjanya adalah 106,70%, ini berarti realisasi sudah melebihi target akhir. Berdasarkan data tersebut maka Balai Besar POM di Pekanbaru perlu melakukan penyesuaian target.

Pencapaian target Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat ini didukung oleh pengawasan sarana distribusi Kosmetik (sarana produksi dalam proses pembinaan), Penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Kosmetik, Pembinaan kepada pelaku usaha (regulatory assistance), Advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor terkait dan pemberian KIE kepada masyarakat.

Untuk mempertahankan capaian kinerja ini maka Balai Besar POM di Pekanbaru memperkuat kerjasama lintas sektor terkait penegakan hukum, meningkatkan anggaran KIE untuk memperluas cakupan penyebaran informasi dan merekomendasikan pemberian sanksi hukum yang memiliki kekuatan efek jera kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, terutama yang sudah berkali-kali ditegur dan diberi sanksi.

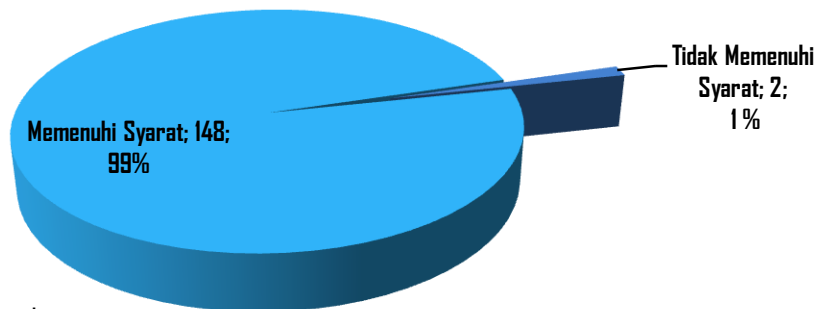
Perbandingan Capaian Persentase kosmetik yang memenuhi syarat



Perbandingan capaian persentase kosmetik yang memenuhi syarat antara Balai Besar POM di Pekanbaru dan BBPOM di Mataram tidak jauh berbeda dengan kriteria memuaskan.

4. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat

Hasil Pengujian Sampel Suplemen Kesehatan



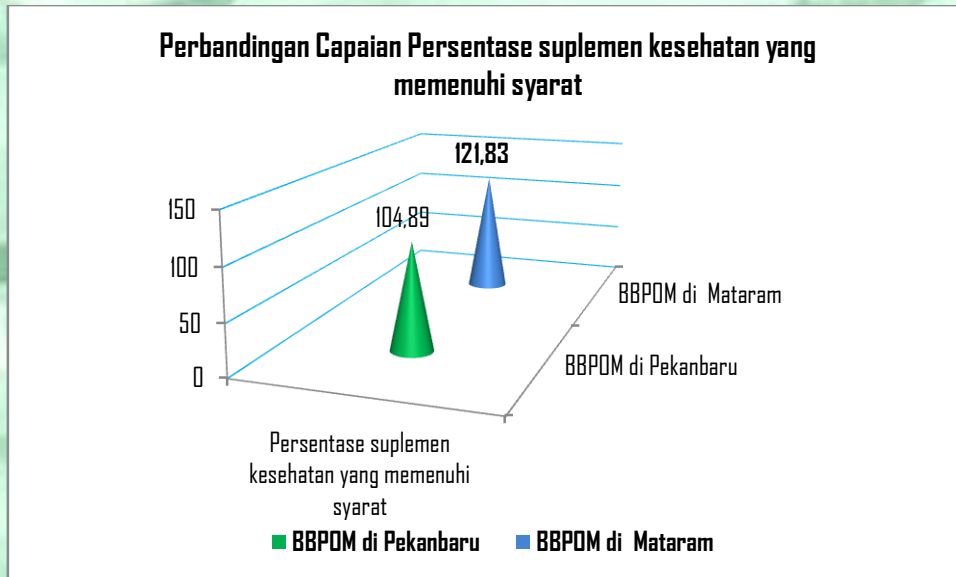
semua telah diuji menggunakan parameter kritis.

Suplemen Kesehatan	2015	2016	2017	2018	2019
Target	90,00%	92,00%	94,00%	96,00%	98,00%
Realisasi	99,33%	89,33%	98,67%		
Persentase Perbandingan (Realisasi/Target)	110,37%	97,10%	104,96%		
Persentase Perbandingan (Realisasi/Target 2019)				*100,68%	

Capaian tahun 2017 untuk indikator kinerja Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat adalah 98,67%. Hasil ini apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2015 (periode awal Renstra) sebesar 110,37% dan capaian kinerja tahun 2016 sebesar 97,10% menunjukkan capaian kinerja tidak mengalami perubahan secara signifikan. Tetapi apabila

dibandingkan dengan target tahun 2019 (periode akhir Renstra) yang sebesar 98.00% maka persentase capaian kerjanya adalah 100.68%. Berdasarkan data tersebut maka Balai Besar POM di Pekanbaru belum perlu melakukan perubahan target akhir.

Untuk mempertahankan capaian kinerja ini maka Balai Besar POM di Pekanbaru memperkuat kerjasama lintas sektor terkait penegakan hukum, meningkatkan anggaran KIE untuk memperluas cakupan penyebaran informasi dan merekomendasikan pemberian sanksi hukum yang memiliki kekuatan efek jera kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, terutama yang sudah berkali-kali ditegur dan diberi sanksi.



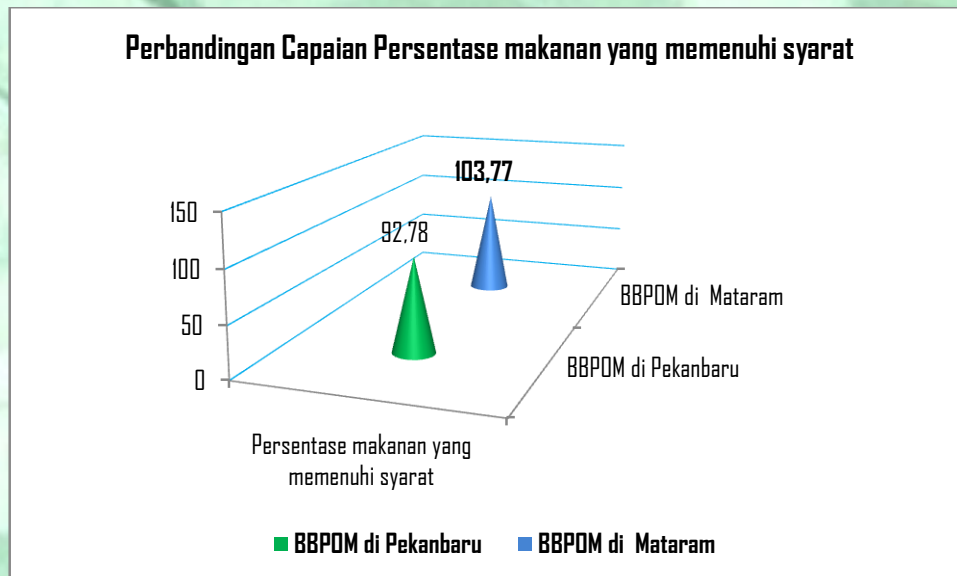
Perbandingan capaian persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat antara Balai Besar POM di Pekanbaru dan BBPOM di Mataram tidak jauh berbeda dengan kriteria memuaskan.

5. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat



Makanan	2015	2016	2017	2018	2019
Target	88,10%	88,60%	89,10%	89,60%	90,10%
Realisasi	82,89%	76,00%	82,67%		
Persentase Perbandingan (Realisasi/Target)	94,09%	85,78%	92,78%		
Persentase Perbandingan (Realisasi/Target 2019)				*91,75%	

Capaian tahun 2017 untuk indikator kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat adalah 82,67%. Hasil ini apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2015 (periode awal Renstra) sebesar 94,09% dan capaian kinerja tahun 2016 sebesar 85,78% menunjukkan terjadinya penurunan capaian kinerja (dalam kriteria cukup). Tetapi apabila dibandingkan dengan target tahun 2019 (periode akhir Renstra) yang sebesar 90,10% maka persentase capaian kinerjanya adalah 91,75%. Berdasarkan data tersebut maka Balai Besar PDM di Pekanbaru perlu melakukan perubahan target akhir. Tidak tercapainya target Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat disebabkan karena pelaku usaha yang belum memenuhi Cara Pengolahan Makanan yang Baik, atau proses retail yang kurang baik, masih lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Makanan, masih kurangnya advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor terkait. Untuk memperbaiki capaian kinerja maka Balai Besar PDM di Pekanbaru perlu meningkatkan pembinaan kepada pelaku usaha, memperkuat/memperluas kerjasama lintas sektor terkait penegakan hukum, meningkatkan anggaran KIE untuk memperluas cakupan penyebaran informasi dan merekomendasikan pemberian sanksi hukum yang memiliki kekuatan efek jera kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, terutama yang sudah berkali-kali ditegur dan diberi sanksi.



Perbandingan capaian persentase makanan yang memenuhi syarat antara Balai Besar PDM di Pekanbaru dan BBPDM di Mataram jauh berbeda dengan kriteria cukup untuk Balai Besar PDM di Pekanbaru dan kriteria memuaskan untuk BBPDM di Mataram.

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan

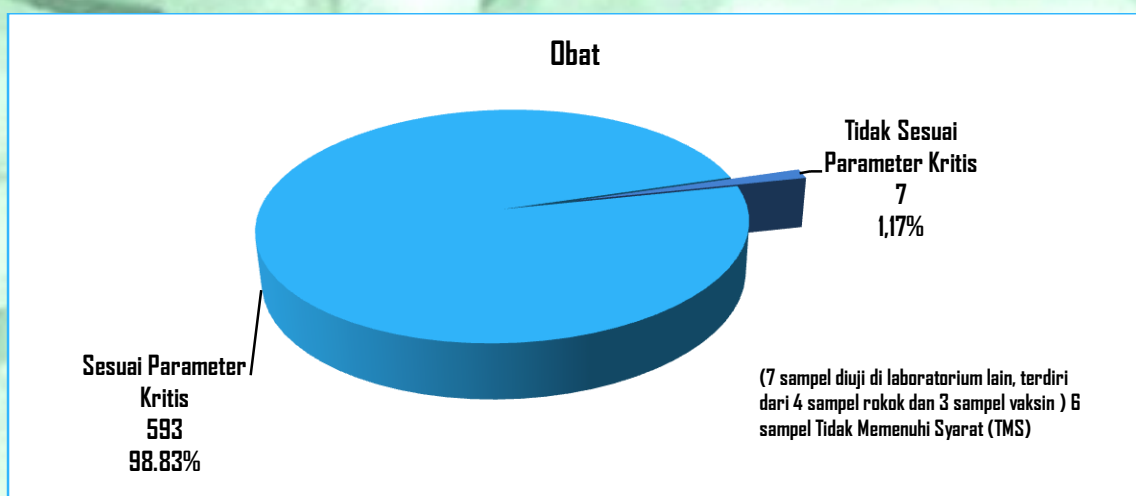
SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Meningkatnya Kualitas Sampling dan Pengujian terhadap Produk Obat dan Makanan yang Beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	3005	2973	98.94
		Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	100%	100%	100
	Meningkatnya Kualitas Sarana Produksi yang Memenuhi Standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	63	63	100
	Meningkatnya Kualitas Sarana Distribusi yang Memenuhi Standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	28	28	100
	Meningkatnya Hasil Tindak Lanjut Penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	19	16	84,21

Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Kualitas Sampling dan Pengujian terhadap Produk Obat dan Makanan yang Beredar

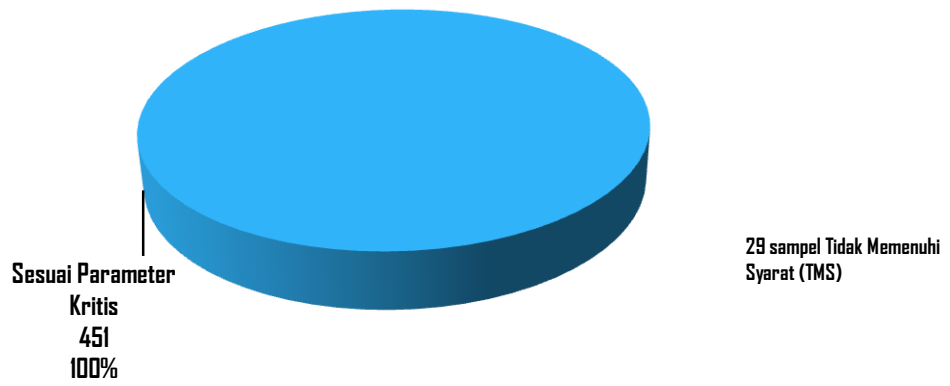
Indikator:

1. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis

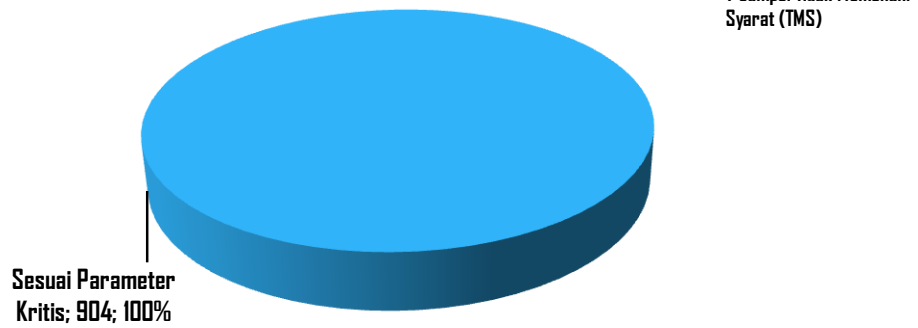
Capaian indikator kinerja jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis dihitung berdasarkan jumlah sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan dan Makanan yang telah disampling di Propinsi Riau yaitu sejumlah 3005 (tiga ribu lima) sampel dengan perincian sebagai berikut :



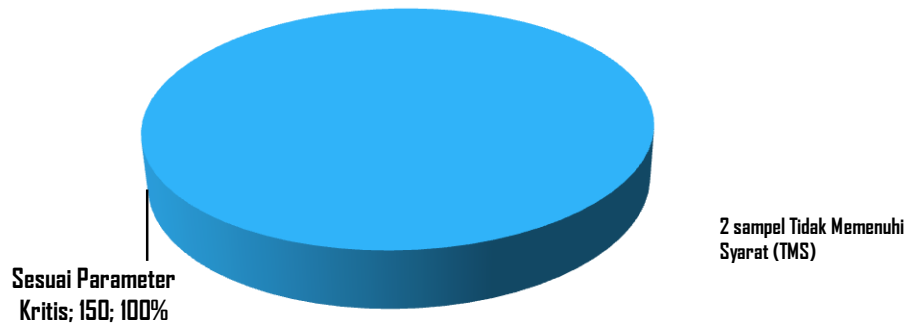
Obat Tradisional dan Produk Komplemen

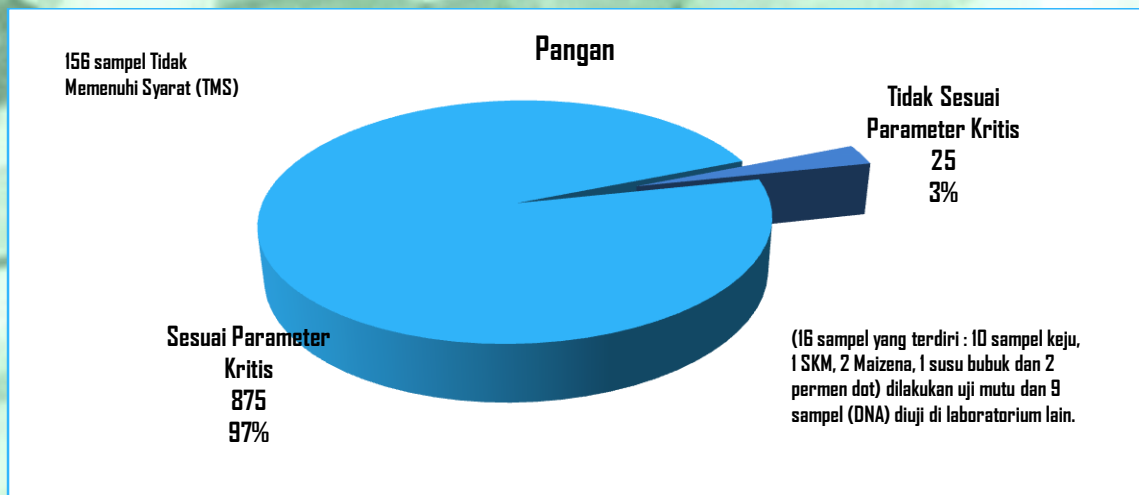


Kosmetik



Suplemen Kesehatan





Jumlah Sampel yang diuji sesuai Parameter Kritis

Parameter Kritis	2015	2016	2017	2018	2019
Target	3000	3005	3005	3005	3005
Realisasi	2706	2867	2973		
Persentase Perbandingan (Realisasi/Target)	90,20%	95,41%	98,93%		
Persentase Perbandingan (Realisasi 2017/ Target 2019)				*98,94%	

Capaian tahun 2017 untuk indikator kinerja Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis adalah 98,93%. Hasil ini apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2015 (periode awal Renstra) sebesar 90,20% dan tahun 2016 sebesar 95,41% menunjukkan capaian kinerja meningkat tetapi tidak mengalami perubahan bermakna (masih dalam kriteria cukup). Tetapi apabila dibandingkan dengan target tahun 2019 (periode akhir Renstra) yang sebesar 3005 sampel maka persentase capaian kerjanya adalah 98,94%. Berdasarkan data ini maka Balai Besar POM di Pekanbaru perlu melakukan beberapa perbaikan agar target akhir tercapai.

Belum tercapainya target Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis ini disebabkan oleh :

a. Peralatan uji tidak ada :

Di laboratorium Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi tidak bisa dilakukan Penetapan Kadar Hg, As, Sn dan identifikasi DNA karena alat microwave dan alat PCR baru datang di akhir tahun.

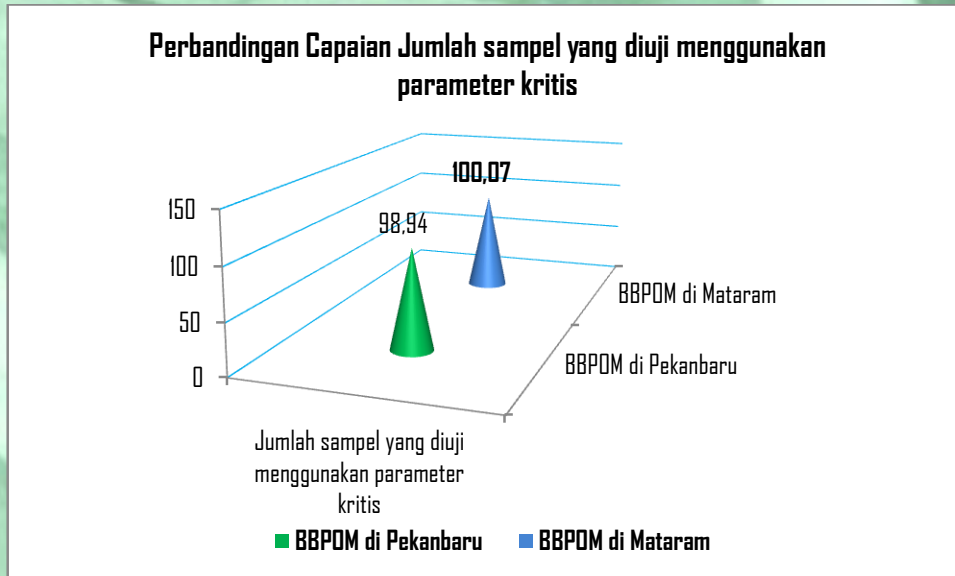
b. Sampel tidak mempunyai uji parameter kritis :

Di laboratorium Pangan dan Bahan Berbahaya masih dilakukan uji sampel yang tidak memiliki parameter kritis yaitu keju, mentega, susu bubuk dan permen dot. Hal ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan mutu dan penyelesaian kasus.

Untuk mengatasi masalah ini perlu dilakukan :

1. Penyesuaian ruang lingkup dengan prioritas sampling

2. Melakukan sampling sesuai petunjuk teknis prioritas sampling



Perbandingan Capaian Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis antara Balai Besar POM di Pekanbaru dan BBPOM di Mataram jauh berbeda dengan kriteria cukup untuk Balai Besar POM di Pekanbaru dan kriteria memuaskan untuk BBPOM di Mataram.

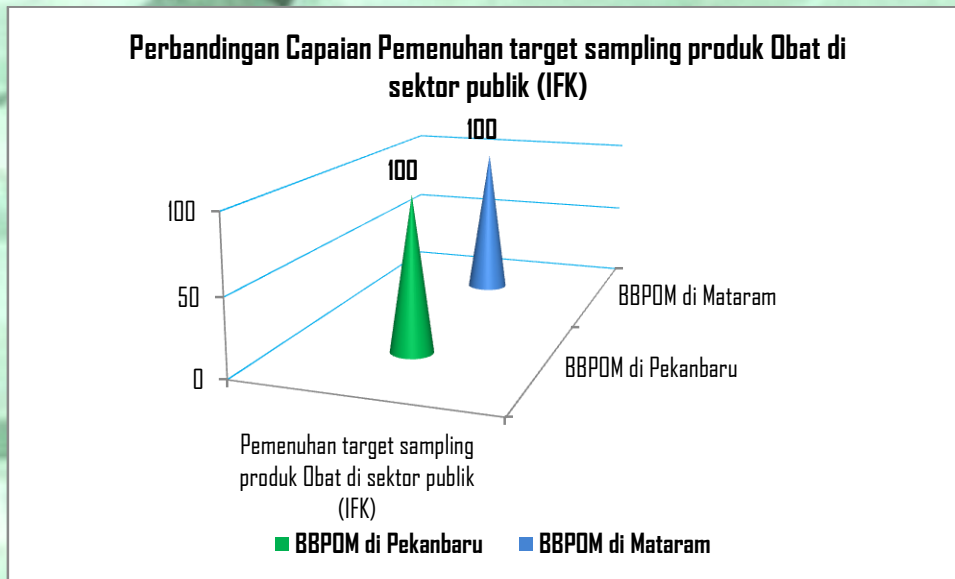
2. Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)

IFK	2015	2016	2017	2018	2019
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	110,00%	95,91%	100,00%		
Persentase Perbandingan (Realisasi/Target)	110,00%	95,91%	100,00%		
Persentase Perbandingan (Realisasi/Target 2019)				*100,00%	

Capaian tahun 2017 untuk indikator kinerja Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK) adalah 100,00%. Hasil ini apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2015 (periode awal Renstra) sebesar 110,00% dan tahun 2016 sebesar 95,91% menunjukkan peningkatan capaian kinerja, untuk target tahun 2019 (periode akhir Renstra) sebesar 100,00% maka persentase capaian kinerjanya adalah 100,00%. Berdasarkan data ini maka Balai Besar POM di Pekanbaru telah mencapai target akhir. Perubahan target indikator kinerja Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK) untuk tahun berikutnya tidak perlu dilakukan.

Tercapainya Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK) disebabkan telah dilakukannya workshop sampling produk terapeutic di sarana pemerintah dengan melibatkan dinas kesehatan dan RS Pemerintah yang terkait pengadaan dan distribusi obat pada bulan Maret 2017 yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan sarana distribusi obat dan pelayanan kesehatan untuk menyediakan stok obat untuk disampling dan diuji di laboratorium Balai Besar POM di Pekanbaru sehingga dapat diketahui kualitas mutunya.

Pemetaan IFK di Provinsi Riau tidak dilakukan karena dalam perjalanannya ternyata target sudah tercapai. Untuk mempertahankan kinerja maka direncanakan tahun 2018 akan dilakukan FGD sampling produk terapeutic di sarana pemerintah.



Perbandingan Capaian Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK) antara Balai Besar POM di Pekanbaru dan BBPOM di Mataram sama dengan kriteria baik.

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Sarana Produksi yang Memenuhi Standar

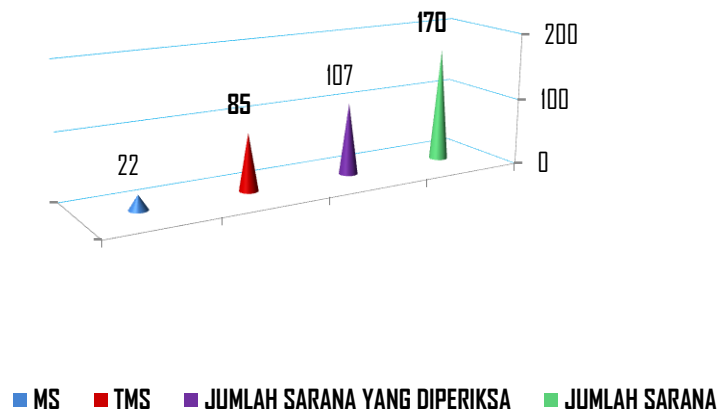
Indikator:

1. Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan

Sarana Produksi	2015	2016	2017	2018	2019
Target	58,00%	63,00%	63,00%	63,00%	63,00%
Realisasi	69,60%	64,20%	63,00%		
Persentase Perbandingan (Realisasi/Target)	120,00%	101,90%	100,00%		
Persentase Perbandingan (Realisasi/Target 2019)				*100,00%	

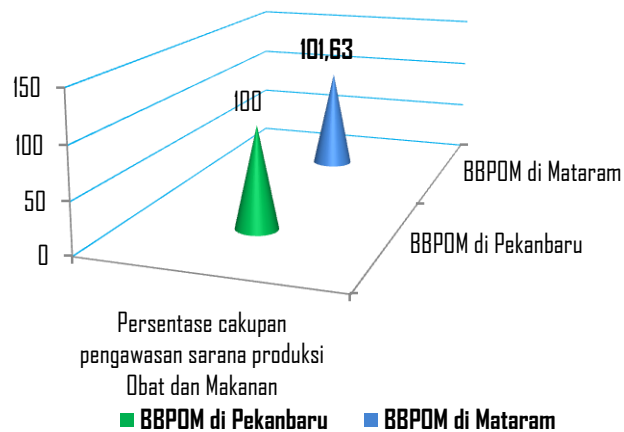
Capaian tahun 2017 untuk indikator kinerja Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan adalah 100,00%. Hasil ini apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2015 (periode awal Renstra) sebesar 120,00% dan tahun 2016 sebesar 101,90% menunjukkan penurunan tetapi tetap dalam kriteria memuaskan. Perbandingan dengan target tahun 2019 (periode akhir Renstra) sejumlah 63,00% maka persentase capaian kerjanya adalah 100,00%. Berdasarkan data tersebut belum perlu dilakukan penyesuaian target.

Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Tahun 2017



Persentase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan adalah 63,00%. Untuk mempertahankan/meningkatkan capaian kinerja ini maka Balai Besar POM di Pekanbaru dapat meningkatkan cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan dengan penguatan sinergisme pembinaan dan pengawasan obat dan makanan yaitu dengan inspeksi bersama sarana produksi DT dan Pangan dengan Pemda (Dinkes). Peningkatan kapasitas SDM dengan ikut serta dalam pelatihan inspektur pangan, inspektur CPKB, inspektur CPOTB, inspektur CPOB (CPOB Darah), serta training HACCP (melibatkan trainer eksternal).

Perbandingan Capaian Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan



Perbandingan Capaian Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan antara Balai Besar POM di Pekanbaru dan BBPOM di Mataram tidak jauh berbeda dengan kriteria baik untuk Balai Besar POM di Pekanbaru. dan kriteria memuaskan untuk BBPOM di Mataram

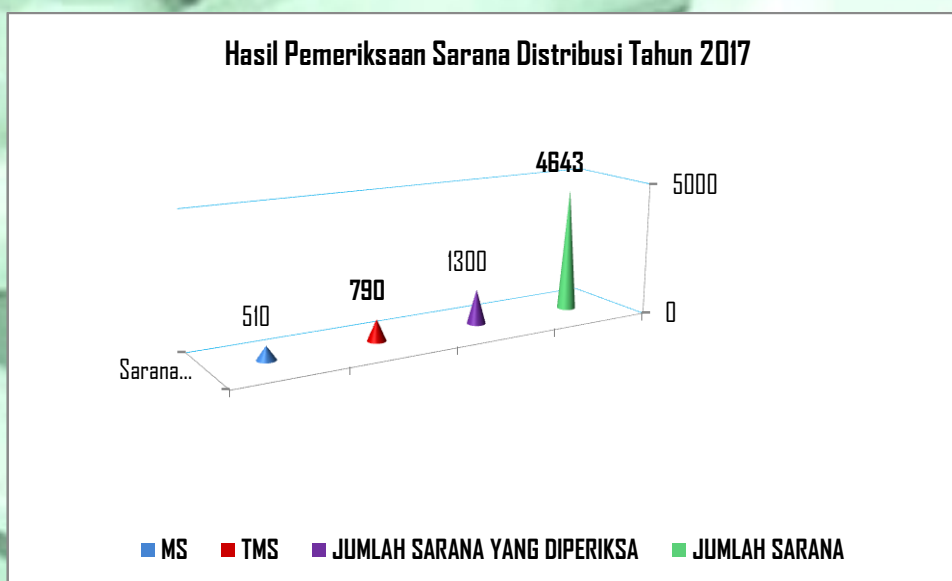
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Sarana Distribusi yang Memenuhi Standar

Indikator:

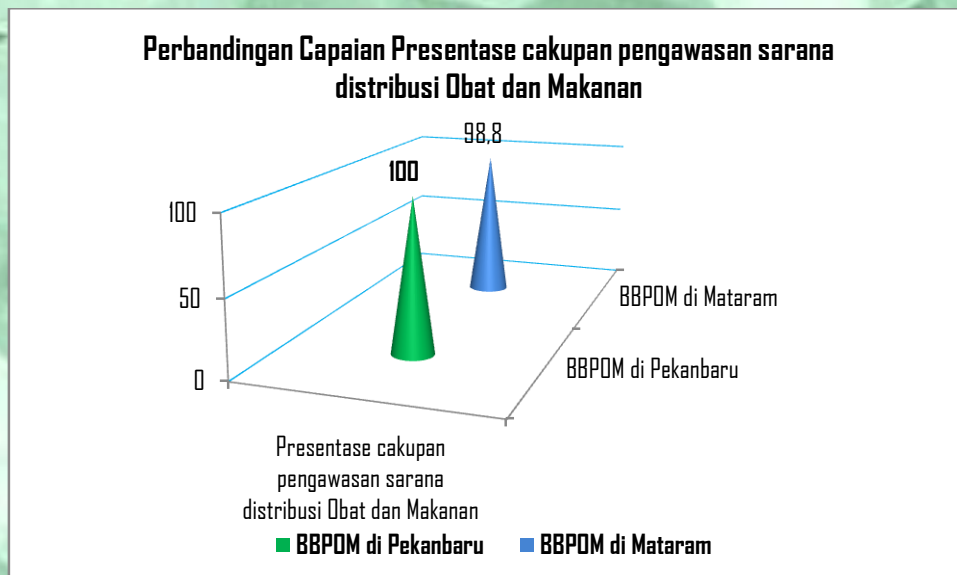
1. Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan

Sarana Distribusi	2015	2016	2017	2018	2019
Target	25,00%	26,00%	28,00%	30,00%	30,00%
Realisasi	41,12%	26,51%	28,00%		
Persentase Perbandingan (Realisasi/Target)	164,48%	101,96%	100,00%		
Persentase Perbandingan (Realisasi/Target 2019)				*93,33%	

Capaian tahun 2017 untuk indikator kinerja Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan adalah 28,00%. Hasil ini apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2015 (periode awal Renstra) sebesar 164,48% dan tahun 2016 sebesar 101,96% menunjukkan penurunan tetapi secara kriteria terjadi peningkatan signifikan dari kriteria Tidak bisa disimpulkan menjadi kriteria Memuaskan. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2019 (periode akhir Renstra) yang sebesar 30,00% maka persentase capaian kinerjanya adalah 93,33%. Berdasarkan data ini maka Balai Besar POM di Pekanbaru perlu melakukan penyesuaian target.



Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan adalah 28,00%. Untuk mempertahankan/meningkatkan capaian kinerja ini maka Balai Besar POM di Pekanbaru dapat meningkatkan cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan dengan penguatan sinergisme pembinaan dan pengawasan obat dan makanan yaitu dengan inspeksi bersama sarana produksi QMKA dengan dinas terkait. Peningkatan kapasitas SDM pengawas dengan mengikutsertakan dalam pelatihan yang berkaitan dengan tupoksinya seperti pelatihan inspektur CDOB, inspektur Kosmetik, inspektur OT dan inspektur Pangan).



Perbandingan Capaian Presentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan antara Balai Besar POM di Pekanbaru dan BBPOM di Mataram jauh berbeda dengan kriteria baik untuk Balai Besar POM di Pekanbaru, dan kriteria cukup untuk BBPOM di Mataram

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Hasil Tindak Lanjut Penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan

Indikator:

1. Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan

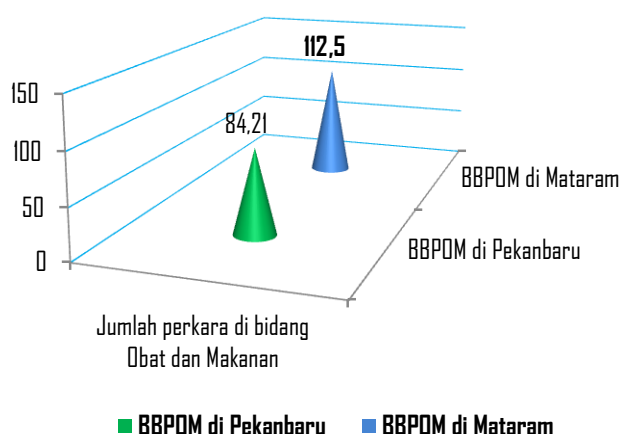
Jumlah Perkara	2015	2016	2017	2018	2019
Target	16	17	19	19	20
Realisasi	17	16	16		
Persentase Perbandingan (Realisasi/Target)	106,25%	94,12%	84,21%		
Persentase Perbandingan (Realisasi/Target 2019)					*84,21%

Capaian tahun 2017 untuk indikator kinerja Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan adalah 84,21%. Hasil ini apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2015 (periode awal Renstra) sebesar 106,25% dan tahun 2016 sebesar 94,12% menunjukkan penurunan capaian kinerja, untuk target tahun 2019 (periode akhir Renstra) sebesar 20 perkara maka persentase capaian kinerjanya adalah 84,21%. Berdasarkan data ini maka Balai Besar POM di Pekanbaru perlu melakukan usaha dan strategi khusus agar target 2019 dapat tercapai.

Belum tercapainya indikator kinerja Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan ini disebabkan karena modus kejahatan di bidang obat dan makanan semakin meningkat dan kompleks, kemajuan teknologi yang pesat salah satunya maraknya penjualan obat dan makanan online.

Untuk meningkatkan capaian kinerja ini maka Balai Besar POM di Pekanbaru harus meningkatkan kemampuan investigasi untuk mengungkap kasus di bidang obat dan makanan, meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor untuk memaksimalkan pengawasan di bidang obat dan makanan antara lain Menkominfo, Dinkes, Polres, dll.

Perbandingan Capaian Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan



Perbandingan Capaian Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan antara Balai Besar POM di Pekanbaru dan BBPOM di Mataram jauh berbeda dengan kriteria cukup untuk Balai Besar POM di Pekanbaru, dan kriteria memuaskan untuk BBPOM di Mataram

Sasaran Strategis 2 - Meningkatkan Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, dan Partisipasi Masyarakat
Indikator Kinerja Sasaran

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat	85	87,25	102,65	Memuaskan
	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	2	2	100,00	Baik

1. Tingkat Kepuasan Masyarakat

Tingkat Kepuasan	2015	2016	2017	2018	2019
Target	70,00	80,00	85,00	85,00	90,00
Realisasi	81,03	82,20	87,25		
Persentase Perbandingan (Realisasi/Target)	115,76%	102,75%	102,65%		
Persentase Perbandingan (Realisasi 2017/ Target 2019)				*96,94%	

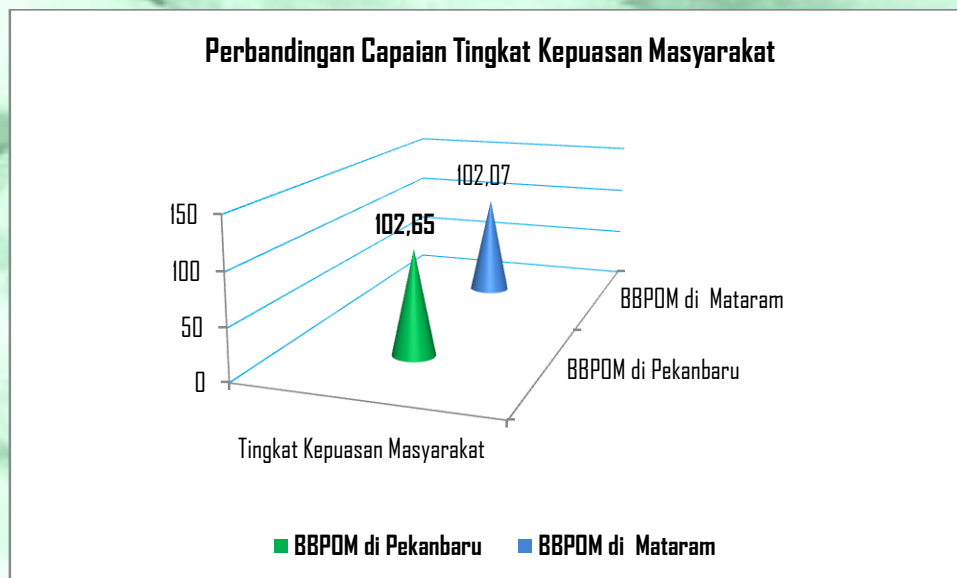
Capaian tahun 2017 untuk indikator kinerja Tingkat Kepuasan Masyarakat adalah 102,65%. Hasil ini apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2015 (periode awal Renstra) sebesar 115,76% dan tahun 2016 sebesar 102,65 % menunjukkan bahwa capaian kinerja stabil, yakni dalam kriteria memuaskan, untuk target tahun 2019 (periode akhir Renstra) sebesar 90,00 maka persentase capaian kinerjanya adalah 96,94%.

Berdasarkan data ini maka Balai Besar POM di Pekanbaru perlu melakukan beberapa perbaikan agar target akhir tercapai. Perubahan target indikator kinerja untuk tahun berikutnya belum perlu dilakukan.

Pengukuran Tingkat Kepuasan Masyarakat dilakukan berdasarkan pada Standar Operating Procedure Badan POM RI Nomor POM 15 SOP 05, tentang Pengukuran Kepuasan Pelanggan. Responden berjumlah 68 (enam puluh delapan) orang, yang berasal dari 2 (dua) unit pelayanan yaitu dari pengujian sampel pihak ketiga sejumlah 38 responden dan ULPK (Unit Layanan Pengaduan Konsumen) sejumlah 30 responden.

Pencapaian target indikator kinerja Tingkat Kepuasan Masyarakat didukung oleh telah terpenuhinya persyaratan minimal layanan publik seperti internet, lemari untuk display produk Tidak Memenuhi Syarat/ Ketentuan dan kompetensi petugas yang dalam memberikan layanan mengacu pada standar layanan publik Badan POM.

Untuk mempertahankan/meningkatkan capaian kinerja ini maka Balai Besar POM di Pekanbaru perlu meningkatkan Sarana dan Prasarana Layanan Publik dalam rangka pemenuhan Standardisasi Layanan Publik Balai Besar POM dan meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM terkait Layanan Publik.



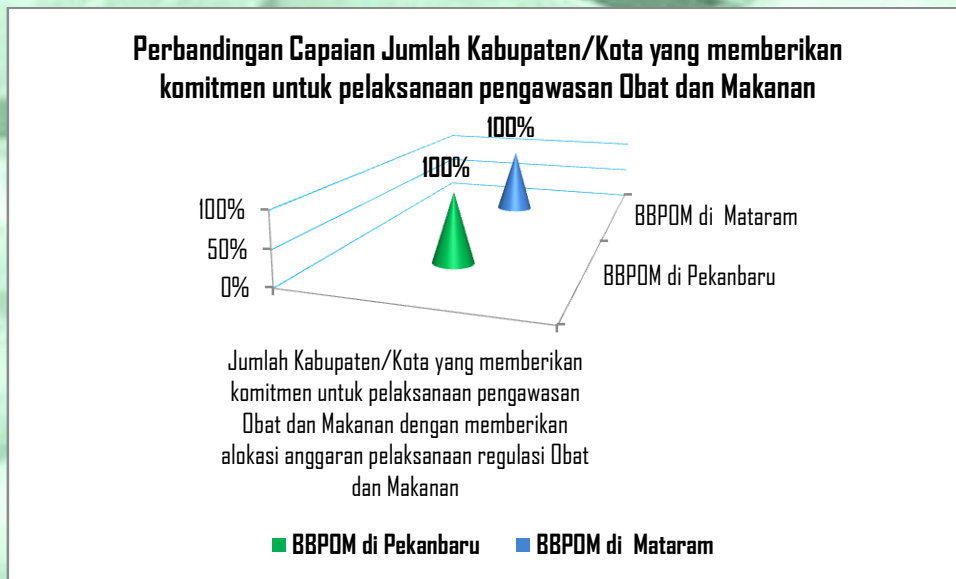
Perbandingan Capaian Tingkat Kepuasan Masyarakat antara Balai Besar POM di Pekanbaru dan BBPOM di Mataram tidak jauh berbeda dengan kriteria memuaskan.

2. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan

Jumlah Kabupaten	2015	2016	2017	2018	2019
Target	0	1	2	3	4
Realisasi	0	1	2		
Persentase Perbandingan (Realisasi/Target)	-	100,00%	100,00%		
Persentase Perbandingan (Realisasi 2017/ Target 2019)				*50,00%	

Capaian tahun 2017 untuk indikator kinerja Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan adalah 100,00%. Untuk tahun 2015 indikator kinerja ini belum ditargetkan karena antara lain masih lemahnya advokasi/ koordinasi dengan Pemerintah Daerah. Capaian kinerja tahun 2016 sebesar 100,00%. Target tahun 2019 (periode akhir Renstra) adalah 4 maka persentase capaian kerjanya adalah 50,00%. Berdasarkan data ini maka Balai Besar POM di Pekanbaru perlu melakukan beberapa perbaikan agar target akhir tercapai. Perubahan target indikator kinerja untuk tahun berikutnya belum perlu dilakukan.

Untuk mempertahankan/meningkatkan capaian kinerja maka Balai Besar POM di Pekanbaru harus meningkatkan advokasi/ koordinasi dengan Pemerintah Daerah sehingga bersedia memberikan alokasi anggaran. terkait pengawasan Obat dan Makanan.



Perbandingan Capaian Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan antara Balai Besar POM di Pekanbaru dan BBPOM di Mataram sama dengan kriteria baik.

Indikator Kinerja Kegiatan

SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, dan Partisipasi Masyarakat	Meningkatnya Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Jumlah Layanan Publik	1000	1452	145,20
		Jumlah Komunitas yang Diberdayakan	23	23	100,00

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

Indikator:

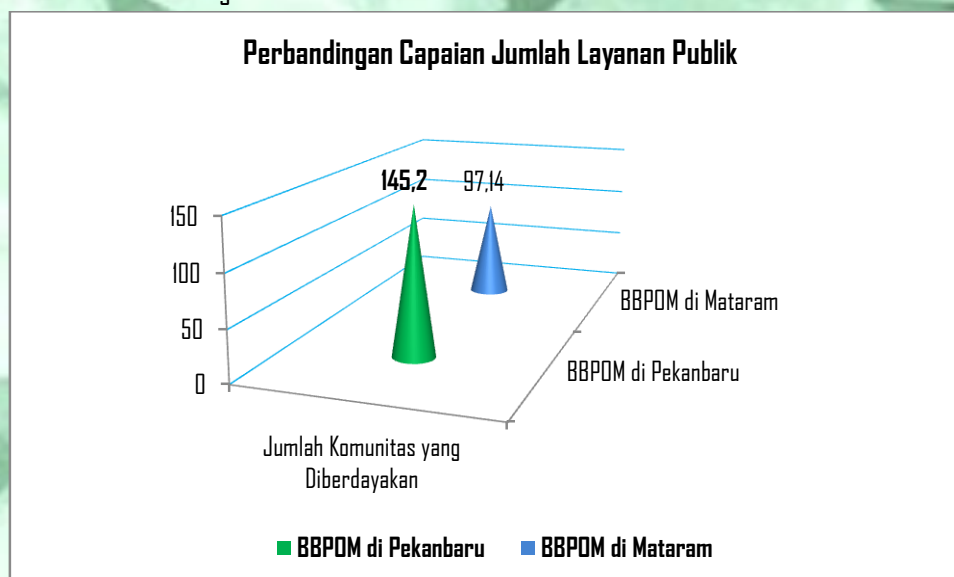
I. Jumlah Layanan Publik

Jumlah Layanan	2015	2016	2017	2018	2019
Target	980	990	1000	1000	1000
Realisasi	1082	1590	1452		
Persentase Perbandingan (Realisasi/Target)	110,41%	160,61%	145,20%		
Persentase Perbandingan (Realisasi 2017/ Target 2019)				*145,20%	

Capaian tahun 2017 untuk indikator kinerja Jumlah Layanan Publik adalah 145,20%. Hasil ini apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2015 (periode awal Renstra) sebesar 110,41% dan tahun 2016 sebesar 160,61% menunjukkan kenaikan capaian kinerja yang tidak normal, untuk target tahun 2019 (periode akhir Renstra) yaitu sebesar 1000 maka persentase capaian kinerjanya adalah 145,20%. Berdasarkan data ini maka Balai Besar POM di Pekanbaru harus melakukan penyesuaian target akhir dengan melakukan perubahan target indikator kinerja untuk tahun berikutnya.

Revisi dilakukan karena beberapa indikator kinerja Jumlah Layanan Publik berada di luar kendali organisasi seperti jumlah sampel pihak ketiga yang diuji di Balai Besar POM di Pekanbaru, jumlah pengaduan konsumen yang masuk dan permintaan narasumber dari lintas sektor.

Untuk meningkatkan capaian kinerja maka Balai Besar POM di Pekanbaru seiring dengan perkembangan teknologi informasi saat ini memanfaatkan penggunaan media sosial yang sedang banyak diminati oleh masyarakat sehingga pendekatannya sesuai dengan apa yang ada di masyarakat dalam memberikan layanan komunikasi, informasi dan edukasi. Selain itu juga harus menyesuaikan definisi operasional indikator yakni hanya memasukkan faktor - faktor yang berada dalam kendali organisasi.



Perbandingan Capaian Jumlah Layanan Publik antara Balai Besar POM di Pekanbaru dan BBPOM di Mataram jauh berbeda dengan kriteria tidak bisa disimpulkan untuk Balai Besar POM di Pekanbaru, dan kriteria cukup untuk BBPOM di Mataram.

2. Jumlah Komunitas yang Diberdayakan

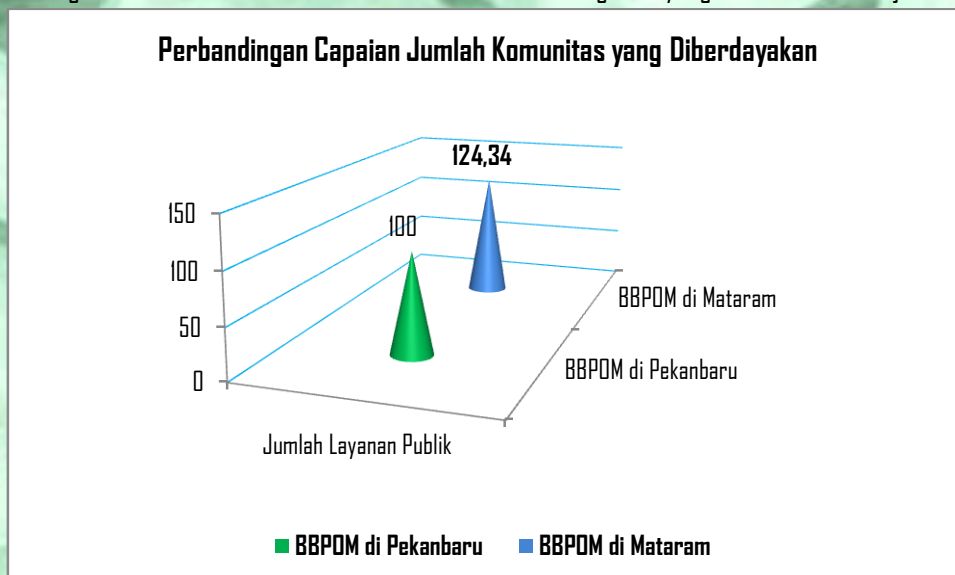
Jumlah Komunitas	2015	2016	2017	2018	2019
Target	15	19	23	27	31
Realisasi	15	19	23		
Persentase Perbandingan (Realisasi/Target)	100,00%	100,00%	100,00%		
Persentase Perbandingan (Realisasi 2017/ Target 2019)					*74,19%

Capaian tahun 2017 untuk indikator kinerja Jumlah Komunitas yang Diberdayakan adalah 100,00%. Hasil ini apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2015 (periode awal Renstra) sebesar 100,00% dan tahun 2016 sebesar 100,00% menunjukkan capaian kinerja tetap dengan kriteria memuaskan. Untuk target tahun 2019 (periode akhir Renstra) adalah 31 maka persentase capaian kinerjanya adalah 74,19%.

Berdasarkan data ini maka Balai Besar POM di Pekanbaru perlu mempertahankan kegiatan yang telah dilakukan agar target akhir tercapai. Perubahan target indikator kinerja untuk tahun berikutnya belum perlu dilakukan.

Tercapainya indikator kinerja Jumlah Komunitas yang Diberdayakan karena adanya dukungan dari lintas sektor terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Pekanbaru. Selain dukungan lintas sektor tersebut, komitmen dari Kepala Desa dan masyarakat setempat juga pengelola pasar yang diintervensi keamanan pangannya merupakan faktor lain yang sangat berperan.

Untuk mempertahankan capaian kinerja ini maka Balai Besar POM di Pekanbaru sebaiknya meningkatkan advokasi/koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait untuk memastikan kegiatan yang direncanakan berjalan sesuai rencana.



Perbandingan Capaian Jumlah Komunitas yang Diberdayakan antara Balai Besar POM di Pekanbaru dan BBPOM di Mataram jauh berbeda dengan kriteria baik untuk Balai Besar POM di Pekanbaru, dan kriteria memuaskan untuk BBPOM di Mataram.

Sasaran Strategis 3 - Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM Indikator Kinerja Sasaran

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP Balai Besar POM di Pekanbaru oleh Badan POM	A (81 - 90)	BB(70,98)	87,63	Cukup

1. Nilai SAKIP Balai Besar POM di Pekanbaru oleh Badan POM

Nilai SAKIP	2015	2016	2017	2018	2019
Target	A (81,0)	A (81,0)	A (81,0)	A	A
Realisasi	B (68,0)	B (68,03)	BB (70,98)		
Persentase Perbandingan (Realisasi/Target)	83,95	83,99	87,63		
Persentase Perbandingan (Realisasi 2017/ Target 2019)				0	

Capaian tahun 2017 untuk indikator kinerja Nilai SAKIP Balai Besar POM di Pekanbaru oleh Badan POM adalah BB. Hasil ini apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2015 (periode awal Renstra) memperoleh nilai B dan tahun 2016 juga memperoleh nilai B menunjukkan terjadinya peningkatan capaian kinerja dengan kriteria Sangat Baik. Untuk target tahun 2019 (periode akhir Renstra) adalah A maka persentase capaian kinerjanya adalah B. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa Balai Besar POM di Pekanbaru harus melakukan beberapa perbaikan/ penyesuaian untuk mencapai target akhir indikator kinerja Nilai SAKIP Balai Besar POM di Pekanbaru oleh Badan POM.

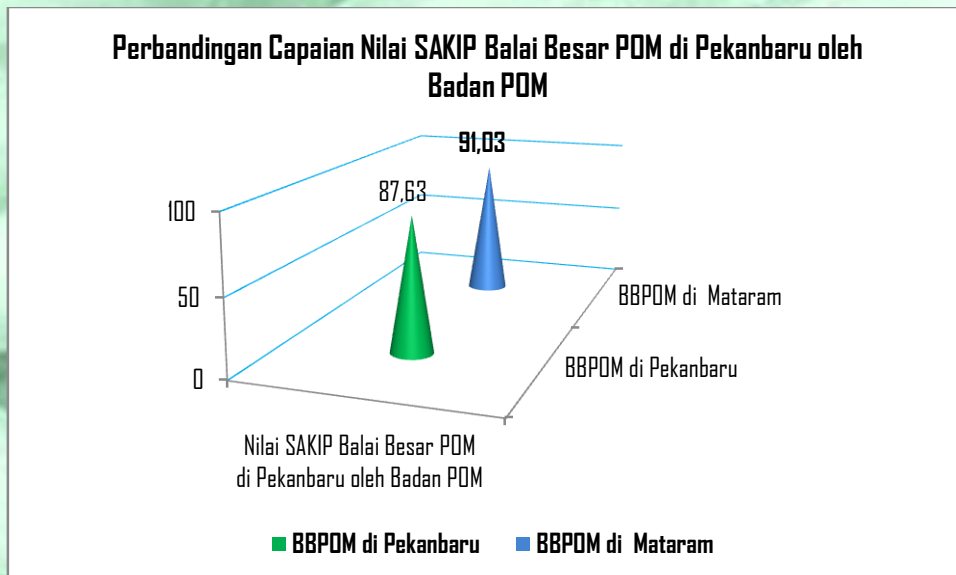
Kriteria penilaian SAKIP didasarkan kepada faktor – faktor :

- Perencanaan Kinerja dengan bobot nilai 30%
- Pengukuran Kinerja dengan bobot nilai 25%
- Pelaporan Kinerja dengan bobot nilai 15%
- Evaluasi dengan bobot nilai 10%
- Capaian Kinerja dengan bobot nilai 20%

Berdasarkan hasil evaluasi penilaian SAKIP Balai Besar POM di Pekanbaru oleh Inspektorat maka untuk Balai Besar POM di Pekanbaru,kelemahan tersebut dapat dilihat pada :

- 1) Penetapan indikator kinerja sasaran strategis II (dua) dan III (tiga) yang belum menggambarkan dengan baik sasaran yang ingin dicapai.
- 2) Belum memiliki mekanisme yang memadai untuk melaksanakan pengukuran kinerja maupun pemantauan kinerja secara berkala.
- 3) Belum terencana dan terlaksananya pengadaan reagensia secara cermat.
- 4) Sistem evaluasi internal yang belum terlaksana dengan efektif sebagai umpan balik penyempurnaan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja karena evaluasi dilakukan pada tahap kegiatan, belum sampai tahap evaluasi program, tetapi apabila dibandingkan dengan perolehan nilai tahun sebelumnya telah terjadi peningkatan nilai.

Untuk meningkatkan capaian kinerja ini maka Balai Besar POM di Pekanbaru harus melakukan perbaikan/ reviu Renstra dan penyempurnaan indikator, mengembangkan mekanisme pengumpulan data dan monitoring kinerja, sehingga perencanaan yang dibuat dapat terlaksana dengan baik. Pelaksanaan RB, Komitmen pimpinan dalam mengawal pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kompetensi SDM serta pemenuhan sarana prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan juga faktor penting yang harus ditingkatkan.



Perbandingan Capaian Nilai SAKIP Balai Besar POM di Pekanbaru oleh Badan POM antara Balai Besar POM di Pekanbaru dan BBPOM di Mataram tidak jauh berbeda dengan kriteria cukup.

Indikator Kinerja Kegiatan

SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana sesuai Standar	84	95,96	114,24
	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan,	Jumlah Dokumen Perencanaan,	10	10	100,00

dan Evaluasi yang
Dilaporkan Tepat Waktu

Penganggaran, Keuangan,
dan Evaluasi yang
Dilaporkan Tepat Waktu

Sasaran Kegiatan: Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan Indikator:

1. Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Sesuai Standar

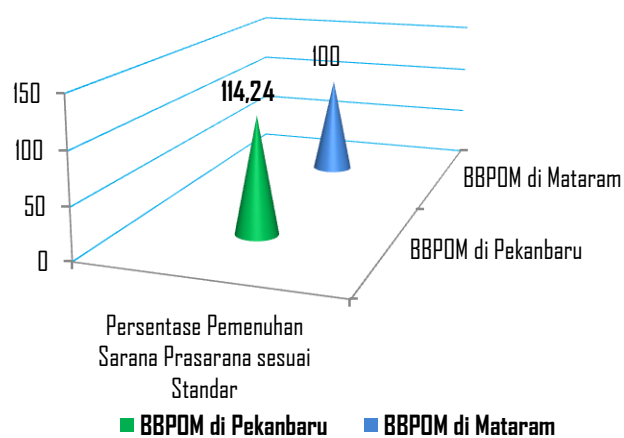
Pemenuhan Sarana	2015	2016	2017	2018	2019
Target	75,00%	78,00%	84,00%	90,00%	95,00%
Realisasi	79,81%	75,70%	95,96%		
Persentase Perbandingan (Realisasi/Target)	106,41%	97,05%	114,24%		
Persentase Perbandingan (Realisasi 2017/ Target 2019)					*101,01%

Capaian tahun 2017 untuk indikator kinerja Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Sesuai Standar adalah 114,24%. Hasil ini apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2015 (periode awal Renstra) sebesar 106,41% dan tahun 2016 sebesar 97,05% menunjukkan peningkatan capaian kinerja. Untuk target tahun 2019 (periode akhir Renstra) adalah 95,00% maka persentase capaian kinerjanya adalah 101,01%.

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa Balai Besar POM di Pekanbaru harus melakukan penyesuaian target akhir indikator kinerja Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Sesuai Standar.

Untuk mempertahankan capaian kinerja diharapkan peningkatan anggaran untuk pemeliharaan sarana prasarana dan komitmen seluruh karyawan dalam memelihara dan menggunakan sarana prasarana yang ada.

Perbandingan Capaian Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana sesuai Standar



Perbandingan Capaian Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana sesuai Standar antara Balai Besar POM di Pekanbaru dan BBPOM di Mataram jauh berbeda dengan kriteria memuaskan untuk Balai Besar POM di Pekanbaru dan kriteria baik untuk BBPOM di Mataram.

Sasaran Kegiatan: Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang Dilaporkan Tepat Waktu
Indikator:

1. Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang Dilaporkan Tepat Waktu

Jumlah Dokumen	2015	2016	2017	2018	2019
Target	10	9	10	9	10
Realisasi	10	9	10		
Persentase Perbandingan (Realisasi/Target)	100,00%	100,00%	100,00%		
Persentase Perbandingan (Realisasi 2017/ Target 2019)				*100,00%	

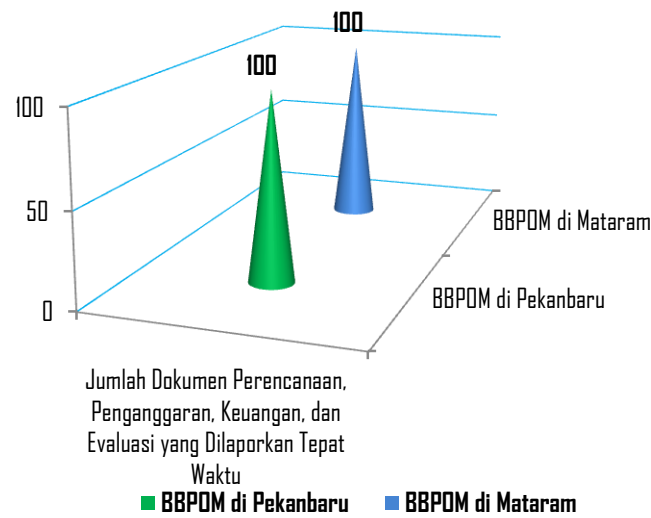
Capaian tahun 2017 untuk indikator kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang Dilaporkan Tepat Waktu adalah 100,00%. Hasil ini apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2015 (periode awal Renstra) dan tahun 2016 yang juga memperoleh nilai 100,00% menunjukkan capaian kinerja tetap dengan kriteria memuaskan. Untuk target tahun 2019 (periode akhir Renstra) adalah 10 maka persentase capaian kinerjanya adalah 100,00%.

Berdasarkan data ini maka Balai Besar POM di Pekanbaru perlu mempertahankan kegiatan yang telah dilakukan agar target akhir tercapai. Perubahan target indikator kinerja untuk tahun berikutnya belum perlu dilakukan.

Tercapainya indikator kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang Dilaporkan Tepat Waktu karena terjalannya komunikasi yang baik antar bidang dan sub bagian, terlaksananya kegiatan sesuai perencanaan dan pelaporan tepat waktu. Komitmen pimpinan yang tinggi dalam membantu pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan.

Untuk mempertahankan/ meningkatkan capaian kinerja indikator Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang Dilaporkan Tepat Waktu dibutuhkan komitmen dari pimpinan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan, adanya monitoring dan evaluasi bulanan terhadap kegiatan berjalan sehingga dapat diantisipasi jika terjadi kendala/ masalah yang dapat memperlambat pelaksanaan kegiatan. Pelaporan kegiatan tepat waktu dan ketersediaan data/ informasi yang dibutuhkan yang mudah untuk diakses dengan menggunakan teknologi terkini.

Perbandingan Capaian Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Evaluasi yang Dilaporkan Tepat Waktu



Perbandingan Capaian Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Evaluasi yang Dilaporkan Tepat Waktu antara Balai Besar POM di Pekanbaru dan BBPOM di Mataram sama dengan kriteria baik.

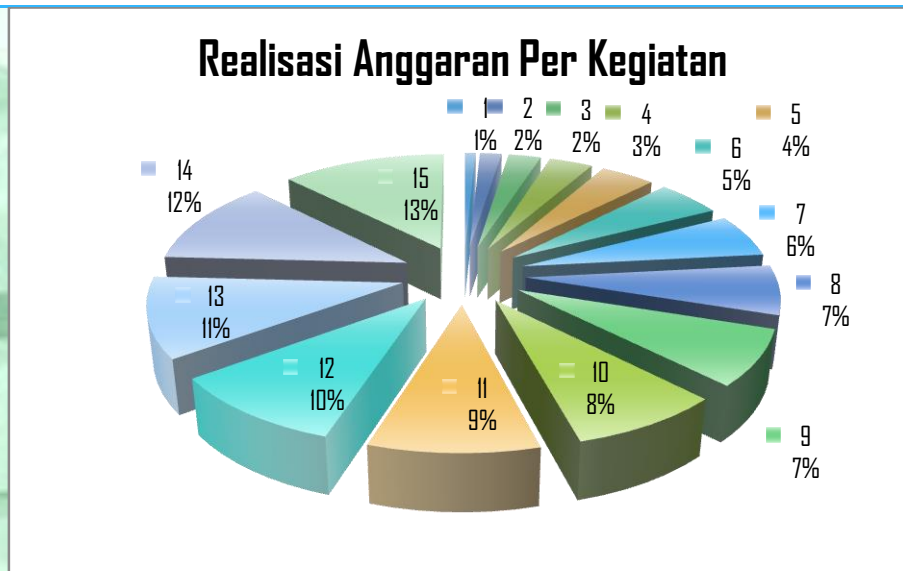
3.2 Realisasi Anggaran

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja dari 3 (tiga) sasaran strategis yang didukung oleh 8 (delapan) sasaran kegiatan kemudian diukur dengan 9 (sembilan) indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk pelaksanaan kegiatan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3. Realisasi Anggaran secara umum

No	KEGIATAN	PAGU	PAGU REVISI TERAKHIR	REALISASI	% CAPAIAN TERHADAP PAGU REVISI TERAKHIR
1	Sampel obat KB yang diuji dengan parameter kritis	15.775.000	15.775.000	6.141.225	38,93%
2	Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan	1.499.890.000	1.499.890.000	597.506.575	39,84%
3	Sampel Makanan yang diuji dengan parameter kritis	622.570.000	226.570.000	189.642.702	83,70%
4	Cakupan Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan	191.188.000	191.188.000	149.469.909	78,18%
5	Cakupan Sarana Distribusi Obat dan Makanan	1.728.428.000	1.628.428.000	1.404.686.231	86,26%
6	Layanan public BB/BPOM	1.014.462.000	825.673.000	604.617.203	73,23%
7	Komunitas yang diberdayakan	3.391.280.000	2.958.878.000	2.621.953.378	88,61%
8	Sarana dan prasana yang sesuai standar	1.640.499.000	1.640.499.000	1.542.149.050	94,00%
9	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	2.024.960.000	2.005.899.000	1.858.892.432	92,67%
10	Laporan Dukungan Teknis Investigasi Awal dan Penyidikan Obat dan Makanan yang Ditangani	1.742.961.000	1.239.181.000	831.487.776	67,10%
11	Laporan Kegiatan dan Dukungan Teknis	2.645.633.000	2.476.668.000	2.219.773.095	89,63%

dan Manajemen Laboratorium yang di Laksanakan					
12	Sampel Obat Yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis	984.004.000	1.237.329.000	1.050.059.585	84,87%
13	Alat laboratorium yang diadakan	11.412.892.000	14.065.542.000	13.740.342.100	97,69%
14	Layanan internal overhead	300.000.000	670.530.000	608.629.646	90,77%
15	Layanan Perkantoran	8.608.701.000	8.500.744.000	8.088.343.463	95,15%
Total		37.823.243.000	39.182.794.000	35.513.694.370	90,98%



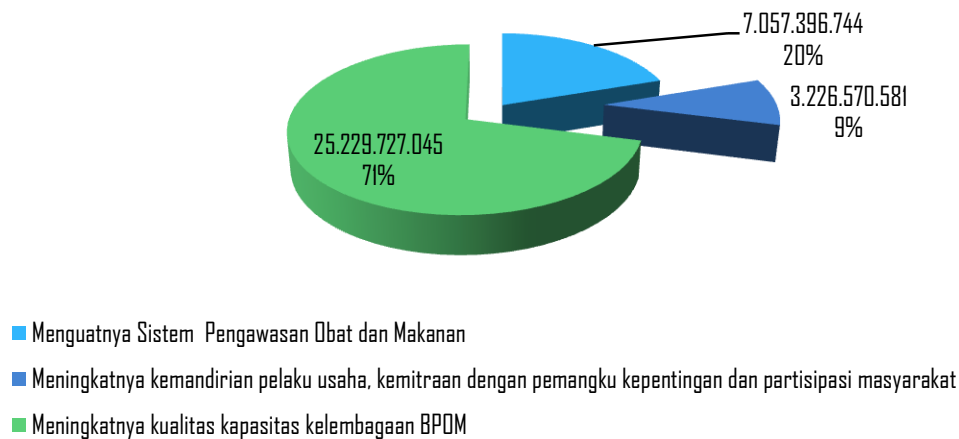
DIPA awal Balai Besar POM di Pekanbaru TA 2017 sebesar Rp. 37.823.243.000,-dengan adanya SE Presiden dan beberapa perubahan kemudian direvisi menjadi Rp.39.182.794.000 . Realisasi penyerapan anggaran untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp35.513. 694.370 atau 90,98 %. Dibandingkan dengan realisasi penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 36.540. 243.365 atau 91,37 % terjadi penurunan persentase penyerapan anggaran sebesar 0,39 %.

Tabel 4. Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (DIPA)	INDIKATOR KINERJA	PAGU	PAGU REVISI TERAKHIR	REALISASI	% CAPAIAN TERHADAP PAGU REVISI TERAKHIR
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan	Input : Dana	1.499.890.000	1.499.890.000	597.506.575	41,75
		Output : Jumlah Kasus Pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan yang ditangani	19	.	16	84,18
	Sarana Produksi Obat dan Makanan Yang Diperiksa	Input : Dana	191.188.000	191.188.000	149.469.909	76,18
		Output :	107		118	110,27
Sarana Distribusi Obat dan Makanan Yang Diperiksa	Input : Dana	1.728.428.000	1.628.428.000	1.404.686.231	87,74	
	Output : Jumlah Sarana Distribusi Yang diperiksa (Komoditi)	1300		1318	101,39	
Laporan Kegiatan dan Dukungan Teknis dan Manajemen Laboratorium yang di Laksanakan	Input : Dana	2.645.633.000	2.476.668.000	2.219.773.095	89,63	
	Output : Jumlah Dokumen Kegiatan teknis dan Manajemen	1		1	100,00	

		laboratorium yang dilaksanakan				
	Sampel Yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di Pekanbaru	Input : Dana	1.622.349.000	1.479.674.000	1.245.843.512	84.20
		Output :	3005		2973	98.94
	Laporan Dukungan Teknis Investigasi Awal dan Penyidikan Obat dan Makanan yang Ditangani	Input : Dana	1.742.961.000	1.239.181.000	831.487.776	69.46
		Output :	1		1	89
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	Layanan public BB/BPOM	Input : Dana	1.014.462.000	825.673.000	604.617.203	73.64
		Output : Jumlah Layanan Informasi dan Dokumen	1000		1.452	134.37
	Komunitas yang diberdayakan	Input : Dana	3.391.280.000	2.958.878.000	2.621.953.378	88.87
		Output :	23		23	100.00
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	Alat laboratorium yang diadakan	Input : Dana	11.412.892.000	14.065.542.000	13.740.342.100	97.48
		Output : Jumlah alat laboratorium yang diadakan	152		152	100.00
	Sarana dan prasarana yang sesuai standar	Input : Dana	1.940.499.000	2.310.849.000	2.150.778.696	93.07
		Output :	1		1	100
	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Input : Dana	2.024.960.000	2.005.899.000	1.878.711.182	93.66
		Output : Jumlah Dokumen yang dihasilkan	10		11	110
	Layanan Perkantoran	Input : Dana	8.608.701.000	8.500.744.000	8.091.524.368	95.19
		Output : Terselenggaranya kegiatan perkantoran	12		12	100.00
Total Target dan Realisasi Anggaran			37.823.243.000	39.182.794.000	35.513.694.370	90.98

Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis



Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi anggaran Balai Besar POM di Pekanbaru TA 2017 secara internal belum optimal (100%). Hal ini disebabkan karena masih adanya perencanaan yang tidak sesuai dengan realisasi, pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan POA (Plan Of Action), sedangkan secara eksternal yaitu adanya penghematan anggaran dan ada beberapa kegiatan Terpadu Pusat dan Balai yang tidak terlaksana, adanya lelang terlambat dilaksanakan dan pembelian lewat e-catalog yang sering bermasalah.

Untuk mempertahankan/ meningkatkan pelaksanaan kegiatan diperlukan komitmen yang tinggi dari pimpinan untuk mengawal pelaksanaan POA agar sesuai dengan rencana, meningkatkan komunikasi dan hubungan kerja yang baik antar bidang dan sub bagian tata usaha, mempercepat proses pengadaan barang dan jasa dan memastikan proses pengadaan sudah berjalan sesuai aturan yang ada dan melakukan monev pelaksanaan kegiatan minimal per triwulan.

3.3 Analisis Efisiensi Kegiatan

Efisiensi kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh.

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien
Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Dari pengukuran efisiensi kegiatan Balai Besar POM di Pekanbaru perkegiatan yang dapat dilihat pada Lampiran 6 dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan masuk kategori efisien.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Secara garis besar, pencapaian kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru memiliki 3 sasaran strategis yang didukung 8 indikator kinerja utama sebagaimana yang tercantum dalam Renstra 2015 – 2019 untuk dicapai. Dua sasaran strategis tersebut pada tahun 2017 telah tercapai dengan kriteria **Memuaskan**, sedangkan satu sasaran strategis diperoleh capaian kinerja dengan kriteria **Cukup**.
2. Pencapaian sasaran strategis I ditunjukkan dengan capaian indikator kinerja utama (IKU) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dimana dari 5 indikator, 4 indikator tercapai dengan hasil diatas 100%, hanya 1 indikator yang capaiannya di bawah 100% yaitu indikator kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat. Hal ini disebabkan oleh pelaku usaha yang belum memenuhi penerapan Cara Pengolahan Makanan yang Baik, atau proses retail yang kurang baik, masih lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Makanan, masih kurangnya advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor terkait. Selain IKU, capaian sasaran strategis I juga ditunjukkan oleh capaian 5 indikator kinerja kegiatan yaitu :
 - a. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis, dimana target tidak tercapai karena kurangnya fasilitas laboratorium dan masih dilakukan pengujian sampel yang tidak mempunyai parameter uji kritis. Hal ini dilakukan untuk memenuhi ruang lingkup laboratorium.
 - b. Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK), dimana target tercapai karena semakin membaiknya hubungan kerja Balai Besar POM di Pekanbaru dengan lintas sektor terkait.
 - c. Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan, dimana target tercapai dengan kriteria baik.
 - d. Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan, dimana target tercapai dengan kriteria baik.
 - e. Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan, dimana target tidak tercapai karena modus kejahatan di bidang obat dan makanan semakin meningkat dan kompleks serta kemajuan teknologi yang pesat salah satunya maraknya penjualan obat dan makanan online.
3. Pencapaian sasaran strategis II ditunjukkan dengan capaian indikator kinerja utama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang memperoleh kriteria Memuaskan. Selain IKU, capaian sasaran strategis II juga ditunjukkan oleh capaian 2 indikator kinerja kegiatan yaitu :
 - a. Jumlah layanan publik, dimana realisasi melebihi target karena beberapa indikator berada di luar kendali organisasi seperti jumlah pengaduan yang masuk, permintaan uji pihak ketiga dan permintaan narasumber.
 - b. Jumlah Komunitas yang Diberdayakan, dimana realisasi sesuai target
4. Pencapaian sasaran strategis III ditunjukkan dengan capaian indikator kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang memperoleh kriteria Cukup. Selain IKU, capaian sasaran strategis III juga ditunjukkan oleh capaian 2 indikator kinerja kegiatan yaitu :
 - a. Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Sesuai Standar, dimana realisasi melebihi target karena adanya revisi anggaran terkait ketersediaan sarana prasarana

- b. Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang Dilaporkan Tepat Waktu, dimana realisasi sesuai target.
5. Seluruh Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan POM secara umum dapat terlaksana secara efisien dengan capaian kinerja memuaskan.
Dalam mencapai target – target kinerja yang telah ditetapkan terdapat kendala – kendala yang dihadapi antara lain :
 - a. Kemajuan teknologi informasi yang pesat, contoh maraknya penjualan obat dan makanan online.
 - b. Masih kurangnya inspektur Pengawasan Obat dan Makanan, baik dari segi jumlah maupun kompetensinya.
 - c. Belum diterapkannya GMP (Good Manufacturing Product) oleh sarana industri secara keseluruhan.
 - d. Masih banyaknya sarana distribusi Obat dan Makanan yang belum memperhatikan aspek kebersihan dalam penyimpanan produk Obat dan Makanan.
 - e. Masih kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat untuk memilih produk Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu.
 - f. Kerjasama dengan lintas sektor terkait sudah baik tetapi masih perlu ditingkatkan baik melalui Sosialisasi/Bimtek/FGD maupun pertemuan lainnya yang dilakukan secara berkala dan terjadwal.

4.2 Saran Rencana Perbaikan Untuk Tahun 2018

1. Pembangunan gudang Pemdik sebagai sarana penyimpanan barang – barang hasil tangkapan/ temuan Balai Besar POM di Pekanbaru.
2. Meningkatkan kompetensi petugas melalui pelatihan – pelatihan dan workshop teknis baik yang terstruktur maupun tidak dalam rangka menunjang pengawasan Obat dan Makanan.
3. Meningkatkan cakupan pengawasan sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan berbasis analisis resiko.
4. Meningkatkan Kegiatan KIE kepada pelaku usaha dan masyarakat di Propinsi Riau.
5. Meningkatkan kerjasama lintas sektor yang semakin intensif melalui kegiatan/operasi bersama terkait pengawasan Obat dan Makanan.
6. Penetapan indikator kinerja individu dalam rangka pemenuhan persyaratan nilai SAKIP.
7. Meningkatkan secara langsung partisipasi pelaku usaha dalam memberikan informasi apabila ditemukan produk mereka yang dipalsukan di pasaran.

Lampiran I. Ikhtisar Renstra

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET					KETERANGAN
		2015	2016	2017	2018	2019	
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Persentase obat yang memenuhi syarat	94	95	96	97	98	
	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	80	81	82	83	84	
	Persentase kosmetik yang memenuhi syarat	89	90	91	92	93	
	Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	90	92	94	96	98	
	Persentase makanan yang memenuhi syarat	88,1	88,6	89,1	89,6	90,1	
Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat	70	80	85	85	90	
	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	0	1	2	3	4	
Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP Balai Besar POM di Pekanbaru oleh Badan POM	A (81 – 90)	A (81 – 90)	A (81 – 90)	A (81 – 90)	A (81 – 90)	



Jl. Diponegoro No. 10 Pekanbaru 28111 Telp. 0761-21496 Fax. 0761 28755 E-mail : balaipom_pku@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PEKANBARU
NOMOR: HK.07.84.11.16.1.2099
TENTANG
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU
TAHUN 2017**

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, perlu ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada Balai Besar POM di Pekanbaru
- Mengingat** :
1. Undang – Undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
 4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Nasional Tahun 2015 -2019;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.21.3546 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 05018/SK/KB POM Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Besar POM di Pekanbaru Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA** : Setiap akhir tahun anggaran, Balai Besar POM di Pekanbaru melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana *Kinerja Tahunan (RKT)*
- KETIGA** : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan salah satu acuan untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar POM di Pekanbaru

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal: 25 November 2016
Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru



Drs. H. Indra Ginting, Apt., MM.
NIP. 19561227 198802 1 001

Tembusan :

1. Sekretaris Utama Badan POM RI
2. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM RI,
Cq. Bagian Evaluasi dan Pelaporan
3. Inspektorat Badan POM RI

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU
TAHUN ANGGARAN 2017**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat Dan Makanan	1 Persentase obat yang memenuhi syarat	96
		2 Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat	82
		3 Persentase kosmetika yang memenuhi syarat	91
		4 Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	94
		5 Persentase makanan yang memenuhi syarat	89,1
II.	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	1 Tingkat kepuasan masyarakat	85%
		2 Jumlah kabupaten/kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi obat dan makanan	2
III.	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BBPOM	Nilai SAKIP BBPOM di Pekanbaru dari Badan POM	A
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	1 Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	3005
		2 Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	100%
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	63
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	28
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran obat dan makanan	Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan	19
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat			
1	Meningkatnya kerja sama, komunikasi, informasi dan edukasi	1 Jumlah layanan publik BBPOM di Pekanbaru	1000


No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		2 Jumlah Komunitas yang diberdayakan	23
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BBPOM			
1	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	84
2	Penyusunan perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10



Pekanbaru, 25 November 2016
Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru

Drs. H. Indra Ginting, Apt., MM
NIP. 19561227 198802 1 001

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Pekanbaru Tahun 2017



BADAN POM
Diponegoro No. 10 Pekanbaru 28111 Telp. 0761-21496 Fax. 0761 28755 E-mail : balaipom_pku@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Adrizal, Apt.,
Jabatan : Plt. Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P
Jabatan : Kepala Badan POM RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.



Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, 06 Januari 2017

Kepala Badan POM
Pihak Pertama,
Drs. Adrizal, Apt.

Kepala Badan POM
Pihak Kedua,
Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017
1.	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat Dan Makanan	Persentase obat yang memenuhi syarat	96
		Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat	82
		Persentase kosmetika yang memenuhi syarat	91
		Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	94
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	89,10
2.	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat	85%
		Jumlah kabupaten/kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi obat dan makanan	2
3.	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan	Nilai SAKIP BBPOM di Pekanbaru dari Badan POM	A
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	3005
		Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	100%
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	63
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	28
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran obat dan makanan	Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan	19
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat			
1	Meningkatnya kerja sama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan publik BBPOM di Pekanbaru	1000
		Jumlah Komunitas yang diberdayakan	23
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan			
1	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	84

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017
2	Penyusunan perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10

Kegiatan :
1 Pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM di Pekanbaru

Anggaran :
Rp. 37.823.243.000



Kepala Badan POM

Dr. Penny K. Lukito, M.C.P



Pekanbaru, 06 Januari 2017

Pt. Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru

Drs. Adrizal, Apt.

Lampiran 4. Pengukuran Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Persentase obat yang memenuhi syarat	96	99.00	103.13	Memuaskan
	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	82	93.57	114.11	Memuaskan
	Persentase kosmetik yang memenuhi syarat	91	99.23	109.04	Memuaskan
	Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	94	98.67	104.97	Memuaskan
	Persentase makanan yang memenuhi syarat	89.1	82.67	92.78	Cukup
Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat	85	87.25	102.65	Memuaskan
	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	2	2	100.00	Baik
Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP Balai Besar POM di Pekanbaru oleh Badan POM	A (81 – 90)	BB (70.98)	87.63	Cukup

Lampiran 5. Pengukuran Kinerja Kegiatan

SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Meningkatnya Kualitas Sampling dan Pengujian terhadap Produk Obat dan Makanan yang Beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	3005	2973	98,94
		Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	100,00%	100%	100
	Meningkatnya Kualitas Sarana Produksi yang Memenuhi Standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	63	63,00	100
	Meningkatnya Kualitas Sarana Distribusi yang Memenuhi Standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	28	28,00	100
	Meningkatnya Hasil Tindak Lanjut Penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	19	16	84,21
Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, dan Partisipasi Masyarakat	Meningkatnya Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Jumlah Layanan Publik	1000	1452	145,2
		Jumlah Komunitas yang Diberdayakan	23	23	100,00
Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana sesuai Standar	84	95,96	114,24
	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Evaluasi yang Dilaporkan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Evaluasi yang Dilaporkan Tepat Waktu	10	10	100,00

Lampiran 6. Pengukuran Kinerja Program

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (DIPA)	INDIKATOR KINERJA	PAGU	PAGU REVISI TERAKHIR	REALISASI	% CAPAIAN TERHADAP PAGU REVISI TERAKHIR	
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan	Input : Dana	1.499.890.000	1.499.890.000	597.506.575	41,75	
		Output : Jumlah Kasus Pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan yang ditangani	19	,	16	84,18	
	Sarana Produksi Obat dan Makanan Yang Diperiksa	Input : Dana	191.188.000	191.188.000	149.469.909	76,18	
		Output :	107		118	110,27	
	Sarana Distribusi Obat dan Makanan Yang Diperiksa	Input : Dana	1.728.428.000	1.628.428.000	1.404.686.231	87,74	
		Output : Jumlah Sarana Distribusi Yang diperiksa (Komoditi)	1300		1318	101,39	
	Laporan Kegiatan dan Dukungan Teknis dan Manajemen Laboratorium yang di Laksanakan	Input : Dana	2.645.633.000	2.476.668.000	2.219.773.095	89,63	
		Output : Jumlah Dokumen Kegiatan teknis dan Manajemen laboratorium yang dilaksanakan	1		1	100,00	
	Sampel Yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di Pekanbaru	Input : Dana	1.622.349.000	1.479.674.000	1.245.843.512	84,20	
		Output :	3005		2973	98,94	
Laporan Dukungan Teknis Investigasi Awal dan Penyidikan Obat dan Makanan yang Ditangani	Input : Dana	1.742.961.000	1.239.181.000	831.487.776	69,46		
	Output :	1		1	89		
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	Layanan public BB/BPDM	Input : Dana	1.014.462.000	825.673.000	604.617.203	73,64	
		Output : Jumlah Layanan Informasi dan Dokumen	1000		1.452	134,37	
	Komunitas yang diberdayakan	Input : Dana	3.391.280.000	2.958.878.000	2.621.953.378	88,87	
		Output :	23		23	100,00	
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPDM	Alat laboratorium yang diadakan	Input : Dana	11.412.892.000	14.065.542.000	13.740.342.100	97,48	
		Output : Jumlah alat laboratorium yang diadakan	152		152	100,00	
	Sarana dan prasarana yang sesuai standar	Input : Dana	1.940.499.000	2.310.849.000	2.150.778.696	93,07	
		Output :	1		1	100,00	
	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Input : Dana	2.024.960.000	2.005.899.000	1.878.711.182	93,66	
		Output : Jumlah Dokumen yang dihasilkan	10		11	110,00	
	Layanan Perkantoran	Input : Dana	8.608.701.000	8.500.744.000	8.091.524.368	95,19	
		Output : Terselenggaranya kegiatan perkantoran	12		12	100,00	
	Total Target dan Realisasi Anggaran			37.823.243.000	39.182.794.000		90,98
						35.513.694.370	

Lampiran 7. Pengukuran Efisiensi Kegiatan

SASARAN STRATEGIS	NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (DIPA)	INPUT	OUTPUT	IE	SE	TE	KATEGORI
Memkuatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	1	Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan	41.75 %	84,18 %	2.02	1	1.02	Efisien
	2	Sarana Produksi Obat dan Makanan Yang Diperiksa	76.18 %	110.27 %	1.45	1	0.45	Efisien
	3	Sarana Distribusi Obat dan Makanan Yang Diperiksa	87.74 %	101.39 %	1.16	1	0.16	Efisien
	4	Laporan Kegiatan dan Dukungan Teknis dan Manajemen Laboratorium yang di Laksanakan	89.63 %	100.00 %	1.12	1	0.12	Efisien
	5	Sampel Yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di Pekanbaru	84.2 %	98.94 %	1.18	1	0.18	Efisien
	6	Laporan Dukungan Teknis Investigasi Awal dan Penyidikan Obat dan Makanan yang Ditangani	69.46 %	89.00 %	1.28	1	0.28	Efisien
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	7	Layanan public. BB/BPDM	73.64 %	134.37 %	1.82	1	0.82	Efisien
	8	Komunitas yang diberdayakan	88.87 %	100.00%	1.13	1	0.13	Efisien
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPDM	9	Alat laboratorium yang diadakan	97.48 %	100.00%	1.02	1	0.02	Efisien
	10	Sarana dan prasarana yang sesuai standar	93.07 %	100.00 %	1.07	1	0.07	Efisien
	11	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	93.66 %	110.00%	1.17	1	0.17	Efisien
	12	Layanan Perkantoran	95.19 %	100.00%	1.05	1	0.05	Efisien